

DPR RI Tetapkan Lima Anggota  
BPK Periode 2019-2024

Hal 9

BPK Serahkan IHPS I 2019

Hal 13

BPK Menghadiri INCOSAI XXIII  
di Moskow

Hal 21



## Bersama Mengawal Keuangan Negara

Kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan karena menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.



■ **Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan**

- 3 Dari Redaksi
- 4 Peran Strategis Mengawal Keuangan Negara
- 9 DPR RI Tetapkan Lima Anggota BPK Periode 2019-2024
- 13 BPK Serahkan IHPS I 2019
- 17 BPK Apresiasi Peningkatan Kualitas LKPD
- 19 Presiden: Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
- 21 BPK Menghadiri INCOSAI XXIII di Moskow
- 22 BPK dan Kemenlu Gali Potensi Menjadi Pemeriksa pada Lembaga Internasional
- 23 Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jaga Selalu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme
- 28 Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI BPK Berperan Mengawal Demokrasi Melalui Pemeriksaan
- 33 Menguji Nyali di Makam Tanjungpura dan Padang 12
- 36 Dari Buku Harian ke Buku Komersial
- 38 Hidup Sehat dengan Ling Tien Kung
- 40 BPK Gelar Pelatihan Audit Kehutanan Internasional ke-6
- 42 Anggota III Paparkan Pentingnya Pembangunan SDM
- 44 BPK Selaraskan Renstra dengan RPJMN
- 46 Opini WTP versus Korupsi
- 49 Berita Foto

**D**PR RI telah memilih dan menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode masa jabatan 2019-2024 pada Kamis (26/9). Pemilihan itu dilakukan karena ada empat orang Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2019 dan satu Anggota yang meninggal dunia.

*Warta Pemeriksa* menyajikan informasi mengenai pergantian tersebut pada edisi Oktober 2019. Pembaca dapat melihat informasi lebih detail mengenai lima Anggota baru yang menjadi Pimpinan BPK dalam rubrik Sorotan.

Selain pimpinan baru, rubrik Sorotan juga menyajikan informasi mengenai kinerja dan capaian BPK periode 2014-2019. Melalui rubrik ini setidaknya kita bisa melihat gambaran mengenai apa saja yang dilakukan oleh BPK selama rentang lima tahun terakhir.

Dari sisi pemeriksaan, BPK tercatat telah mengeluarkan lebih dari 200 ribu rekomendasi. Kualitas opini Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKLL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pun mengalami peningkatan. Jumlah entitas yang meraih laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga semakin banyak. Peningkatan itu terjadi antara lain karena rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK ditindaklanjuti oleh *auditee*.

Sementara pada BPK Bekerja, redaksi menyajikan informasi mengenai penyerahan IHPS I 2019 ke Presiden, DPR, dan DPD. Dalam penyampaiannya, BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun. Jumlah tersebut meliputi 7.236 (48 persen) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), 7.636 (51 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 93 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Redaksi juga menulis mengenai penegasan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK. Dalam paparannya, Presiden berharap seluruh K/L dapat memperbaiki laporan keuangannya sehingga bisa mencapai opini WTP.

Simak juga wawancara eksklusif redaksi dengan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang memasuki masa pensiun pada pertengahan Oktober ini. Ada banyak pesan dan harapan yang disampaikan kepada seluruh insan BPK. Termasuk kepada ketua BPK baru nantinya.

Sebagai inspirasi, redaksi juga menyampaikan informasi mengenai hobi menulis Sigit Rais, staf Subbag Publikasi dan Media yang kini malah menghasilkan keuntungan. Disajikan di rubrik Bisnis dan Niaga, pembaca bisa melihat bahwa dari hanya sekadar hobi, Sigit kini telah membuat 50 buku yang sebagiannya telah dijual secara komersial.

Masih banyak informasi menarik lain yang bisa pembaca nikmati pada edisi kali ini. Kami juga kembali mengingatkan bahwa redaksi selalu terbuka untuk menerima tulisan dari pembaca. Akhir kata, silakan menikmati. ●

## Tim Editorial

### Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

### Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Redaksi

Bidramnanta  
Iqra Fiqh  
Yudha Bayangkara  
Putra Zamrud  
Aksara Bentala  
Ren Jingga

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Reza Hadi Satria  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Sudarmanto

### Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Diterbitkan oleh:  
Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia



# Peran Strategis Mengawal Keuangan Negara

Pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dan kondisi perlu.



**B**PK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu.

Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

## TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



Tema dan fokus pemeriksaan tersebut merupakan arah kebijakan pemeriksaan BPK untuk tahun 2016-2020. Dengan pemeriksaan atas tema dan fokus pemeriksaan tersebut, hasil pemeriksaan BPK dapat bermanfaat untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara.

Terkait tema pemeriksaan Perekonomian dan Keuangan Negara, pemeriksaan difokuskan pada dua program prioritas pemerintah. Kedua program itu adalah pelaksanaan reformasi keuangan negara serta peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN.

Fokus pemeriksaan terkait pelaksanaan reformasi keuangan negara diarahkan pada area-area kunci yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, terkait dengan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan ini, tujuan pemeriksaan strategis tentatif antara lain adalah menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemungutan



**BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.**



perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Kemudian, menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi.

Sedangkan untuk mengawal peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN, pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas pengelolaan BUMN. Selain itu, menilai tata kelola korporasi yang baik, menilai restrukturisasi BUMN (pembentukan *holding company* BUMN, kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN), hingga menilai sinergi antar-BUMN.

BPK juga melakukan pemeriksaan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Dalam upaya menilai keberhasilan pembangunan pemerintah pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, ditetapkan empat tema pemeriksaan, yaitu kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, serta penduduk dan keluarga berencana. Pemeriksaan pada tema-tema pemeriksaan tersebut difokuskan pada program-program prioritas tertentu yang dinilai memberikan *leverage* yang paling tinggi terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat dan relevan dengan tugas dan kewenangan BPK.

Pada sektor kesehatan, BPK memeriksa Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI. Pemeriksaan atas fokus ini diarahkan pada area-area kunci yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN untuk meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi penduduk baik untuk PBI melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Non-PBI. Beberapa tujuan pemeriksaan strategis tentatif terkait fokus ini adalah menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN untuk meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Selain itu, menilai kualitas pemenuhan kepesertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh (*universal health coverage*) baik kepesertaan untuk PBI melalui KIS maupun Non-PBI.

Sementara, fokus pemeriksaan pada tema pendidikan adalah mengenai Pelaksanaan Pro-



Untuk mengawal peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN, pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas pengelolaan BUMN.



gram Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas, Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi.

Tujuan pemeriksaan terkait program Indonesia Pintar adalah menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas; menilai pemenuhan layanan pendidikan dasar berkualitas; menilai peningkatan akses, perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas; dan menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas.

Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 turut

menjadikan pembangunan karakter dan mental sebagai program prioritas. Pemeriksaan BPK terkait tema ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan pada tema karakter dan mental, salah satunya adalah mengenai Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah bagi Umat Beragama: Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Terkait pemeriksaan pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, BPK menetapkan tiga subdimensi pembangunan pemerintah dalam dimensi pembangunan sektor unggulan, yaitu ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, serta kemaritiman dan kelautan sebagai tema pemeriksaan BPK. Pemeriksaan pada tema-tema pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan pada keseluruhan program pembangunan prioritas yang direncanakan pemerintah, tetapi difokuskan pada program prioritas tertentu yang dinilai memberikan leverage yang paling tinggi terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat dan relevan dengan tugas dan kewenangan BPK.

BPK memilih subtema ketersediaan pangan karena pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat, namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi, baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang. Pemeriksaan menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan untuk kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan air untuk ekonomi produktif, khususnya layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa fokus pemeriksaan pada tema ketersediaan pangan adalah Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan serta Peningkatan Ketersediaan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional.

Sektor energi dan ketenagalistrikan turut dikawal BPK. Pemerintah menetapkan tujuh arah pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan dalam RPJMN 2015-2019. Ketujuh arah itu adalah produksi energi primer terutama minyak dan gas; cadangan penyangga dan operasional energi; peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; aksesibilitas energi; efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran; dan pemanfaatan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Pemeriksaan BPK di sektor ini menitikberatkan pada peningkatan penyediaan energi dan ketenagalistrikan di pemukiman mencakup rumah tangga, nelayan, komersial dan transportasi. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan BPK pada tema ketersediaan energi dan kelistrikan adalah mengenai Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan di Kawasan Pemukiman (mencakup rumah tangga, nelayan, komersial dan transportasi).

Pemeriksaan bertujuan menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penyediaan energi dan ketenagalistrikan, menilai penyediaan infrastruktur dan layanan ketenagalistrikan, hingga menilai pengelolaan gas dan BBM dalam rangka tersedianya energi gas dan BBM untuk kebutuhan dalam negeri.

Adapun terkait pemeriksaan pada sektor Kemaritiman dan Kelautan, BPK menitikberatkan pemeriksaan pada pembangunan tol laut untuk peningkatan konektivitas laut. BPK memfokuskan pemeriksaan terkait program Penguatan Konektivitas Nasional: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.

Pemeriksaan atas fokus ini diarahkan pada area-area kunci yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut untuk memperkuat konektivitas dalam upaya mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan. Beberapa tujuan pemeriksaan BPK terkait tema ini adalah menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut serta terwujud konektivitas baik lokal maupun nasional dan global; menilai penyediaan angkutan manusia dan logistik perairan, dermaga dan pelabuhan, serta sarana dan prasarana penunjang transportasi laut; hingga menilai kualitas penyediaan layanan transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah nonkomersial lainnya.

Selanjutnya, BPK melakukan pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. RPJMN 2015—2019 menyatakan bahwa ketidakmerataan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok bangsa yang harus diselesaikan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk itu, RPJMN 2015—2019 telah menjabarkan berbagai kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengatasi isu-isu strategis terkait dengan pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

Sebagai upaya menilai keberhasilan pemba-

ngunan pemerintah pada dimensi pemerataan dan kewilayahan, pemeriksaan BPK dititikberatkan pada upaya-upaya pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa serta perwujudan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan nonproduktif (pensium).

Fokus pemeriksaan BPK pada tema pembangunan kewilayahan adalah Pembangunan desa dan kawasan pedesaan, Pembangunan Kawasan Perbatasan, serta Penguatan Konektivitas Nasional: Darat, Udara, dan Jalan.

Sementara, terkait tema pemerataan pembangunan, pemeriksaan BPK difokuskan pada program Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BPK sebagai lembaga pemeriksa yang juga merupakan bagian integral dalam ketatalembagaan negara dan turut berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan nasional, berusaha untuk mengawal kebijakan dan strategi mengenai dimensi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemeriksaan diarahkan untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam memantapkan kondisi perlu pembangunan, khususnya terkait Keamanan dan Ketertiban, dan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal Keamanan dan Ketertiban, pemeriksaan difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Pemeriksaan BPK atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional yang kondusif.

Adapun terkait tata kelola dan reformasi birokrasi, fokus pemeriksaan BPK adalah mengenai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pemeriksaan BPK atas fokus ini diarahkan pada area-area kunci yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas oleh seluruh lembaga dan aparat pemerintah. BPK antara lain menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas; menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan satu atap untuk investasi dan perijinan bisnis dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik; hingga menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. ●



# DPR RI Tetapkan Lima Anggota BPK Periode 2019-2024

Pemilihan lima Anggota periode 2019-2024 dilakukan karena ada empat orang Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober dan satu orang anggota BPK yang meninggal dunia.

**D**PR RI telah menetapkan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode masa jabatan 2019-2024. DPR mengesahkan lima anggota BPK terpilih dalam rapat paripurna DPR RI ke-11 masa sidang 2019-2029 pada Kamis (26/9), setelah sehari sebelumnya melakukan pemilihan dengan mekanisme voting.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut berdasarkan urutan jumlah perolehan suara adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Azis. Pius Lustrilanang merupakan mantan anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Ia terakhir kali menjabat sebagai Anggota Komisi XI. Daniel Tumban Tobing yang juga mantan anggota DPR periode 2014-2019, terakhir kali menjabat sebagai Anggota Komisi VI.

Sementara, tiga Anggota terpilih lainnya berasal dari BPK. Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis merupakan pejabat Anggota BPK. Adapun Hendra



■ Lima Anggota BPK periode 2019-2024 bersama Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR.

Susanto sebelumnya merupakan Kepala Auditoriat Keuangan Negara I.B BPK.

Pemilihan lima Anggota periode 2019-2024 dilakukan karena ada empat orang Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober dan satu orang anggota BPK yang meninggal dunia. Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya yaitu Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua merangkap Anggota BPK), Achsanul Qosasi (Anggota III BPK), Rizal Djalil (Anggota IV BPK), Harry Azhar Azis (Anggota VI BPK). Satu posisi lagi dibutuhkan untuk menggantikan Anggota VII Eddy Muljadi Soepardi yang tutup usia pada 7 Januari 2019.

Pimpinan Komisi XI Juliari P Batubara dalam laporan atas hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon Anggota BPK yang disampaikan

pada Rapat Paripurna mengatakan, Komisi XI DPR pada 25 September 2019 melakukan pemilihan dan menetapkan lima orang calon Anggota BPK periode 2019-2024.

Sebelumnya, 56 Anggota Komisi XI DPR melakukan pemilihan melalui voting terhadap 55 calon Anggota BPK yang mengikuti *fit and proper test* dan berhasil memutuskan lima calon Anggota BPK. "Komisi XI melakukan *fit and proper test* terhadap seluruh calon (62 orang), namun tujuh orang tidak ikut *fit and proper test* tersebut, sehingga calon yang mengikuti *fit and proper test* sebanyak 55 orang," kata Juliari.

Setelah ditetapkan sebagai anggota BPK, DPR menyampaikan nama kelima anggota terpilih kepada Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pelantikan. ●

# PROFIL LIMA ANGGOTA BPK

## Periode 2019-2024

### 1 ACHSANUL QOSASI

**TTL:** Sumenep, 10 Januari 1966

#### Riwayat Pendidikan:

1. S-3 Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran, 2018
2. S-2 Economic Science, Jose Rizal University, Manila-Philippines
3. S-1 Ekonomi, Ekonomi Universitas Pancasila, lulus 1989
4. SMA Negeri 42 Jakarta Timur (1,5 tahun)
5. SMA Negeri I Sumenep (1,5 tahun)
6. SMP Negeri Sumenep, lulus tahun 1981
7. SD Negeri Daramista, Sumenep-Madura, lulus tahun 1978.

#### Sejumlah Riwayat Pekerjaan

1. Anggota III BPK RI, April 2017-Oktober 2019
2. Anggota VII BPK RI, Oktober 2014-April 2017
3. Komisaris Link-Net (Lippo Group) 2011-2014
4. Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Luwuk, Sulawesi Tengah, 2007-2014
5. Direktur Utama PT Saputra Inheritance 2006-2008
6. Direktur PT Sharia Consultant 2004-2006



### 2 DANIEL LUMBAN TOBING

**TTL:** Surabaya, 14 Desember 1967

#### Riwayat Pendidikan

- 1993 : Kyoto University, graduated Electronics Engineering, Kyoto, Jepang (S1)  
 1987: Japanese Language in Takushoku University Tokyo  
 1986: SMAN 68 Jakarta  
 1983: SMP Van Lith Jakarta  
 1980: SD Van Lith Jakarta

#### Riwayat Pekerjaan

- 2014-2019: Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan
- 2009-2014: Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan
- 1993-2008: Top Management di PT Indonesia Epson Industri, Bekasi



## 3 HARRY AZHAR AZIS

**TTL:** Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956

### Riwayat Pendidikan

1. Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, 1994-2000, Doctor of Philosophy (PhD) Bidang Ekonomi
2. University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat, 1988-1990, Master of Arts (MA) Bidang Kebijakan Ekonomi Publik
3. Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1981-1985, Sarjana Manajemen Industri (M.Sc.)
4. Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1975-1980, B.Sc. Manajemen Perusahaan
5. SMA Negeri 4, Jl. Batu, DKI Jakarta, 1972-1974, tamat
6. SMP Negeri 74, Jakarta, DKI Jakarta, 1971-1972, tamat
7. SMP Negeri II, Tanjung Pinang, Kepri, 1970-1971, lanjut ke SMP Negeri 74 Jakarta.
8. SD Negeri II, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 1963-1969, tamat
9. TK Yalasenastri Angkatan Laut RI, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 1962-1963

### Sejumlah riwayat Pekerjaan

1. April 2017-Oktober 2019: Anggota VI BPK RI
2. Oktober 2014-April 2017: Ketua BPK RI
3. 2009-2014: Anggota DPR RI
4. 2004-2009: Anggota DPR RI



## 4 HENDRA SUSANTO

**TTL:** Lahat, 14 September 1972

### Riwayat Pendidikan

1. S1 Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya Palembang
2. S2 Integrated Urban Engineering di International Institute of Infrastructure, Hydraulic, and Environmental Engineering, Delft, The Netherlands
3. S2 Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada
4. S3 Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjajaran Kandidat Doctor, Kajian Digital Forensik

### Jabatan terakhir di BPK:

Kepala Auditorat Keuangan Negara I.B



## 5 PIUS LUSTRILANANG

**TTL:** Palembang, 10 Oktober 1968

### Riwayat Pendidikan

- 2015-2018: Universitas Brawijaya Jurusan Ilmu Administrasi (S3)  
 2004-2006: Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Kepolisian (S2)  
 1987-1995: Universitas Parahyangan Jurusan Hubungan Internasional (S1)  
 1984-1987: SMA Kolose De Britto, Yogyakarta  
 1975-1981: SD Xaverius V, Palembang

### Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPR RI Periode 2014-2019
- Anggota DPR RI Periode 2009-2014
- Direktur Utama PT Brigas Lustrilanang Security (sejak 2000)







**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# Kini hadir

# e-PPfD

**permohonan informasi dan  
menyampaikan pengaduan  
semakin mudah**



**e-ppid.bpk.go.id**

# BPK Serahkan IHPS I 2019



■ Pimpinan BPK menyerahkan IHPS I Tahun 2019 ke Ketua DPR RI pada Selasa, 17 September 2019.

IHPS I 2019 merupakan laporan capaian kinerja terakhir dari pimpinan BPK periode 2014-2019.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah merampungkan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019. BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun. Jumlah tersebut meliputi 7,236 (48 persen) permasalahan kelemahan Sis-

tem Pengendalian Internal (SPI), 7.636 (51 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 93 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

IHPS I 2019 telah disampaikan BPK kepada DPR, Presiden Joko Widodo, dan DPD pada medio September. Pada Selasa, 17 September 2019, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegera menyampaikan IHPS I 2019 secara langsung kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna DPR. Selain Ketua BPK, penyampaian IHPS I 2019

tersebut dihadiri Wakil Ketua BPK Baharullah Akbar, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota V BPK Isma Yatun, serta pejabat pimpinan tinggi madya BPK.

Dari 7.636 permasalahan ketidakpatuhan yang ada dalam IHPS I 2019, sebanyak 4.838 di antaranya atau 63 persen dari permasalahan dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp9,68 triliun.

Selain itu, terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.



“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar,” kata Moermahadi di Kompleks Parlemen, Jakarta.

IHPS I 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018.

Dalam pemeriksaan LKPP, BPK memeriksa 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018, sedangkan laporan keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LK BUN Tahun 2018 menunjukkan bahwa 81 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Menyakinkan Pendapat (TMP).

LKKL yang memperoleh opini WTP telah mengalami peningkatan dari 65 persen atau sebanyak 56 LKKL pada 2015 menjadi 94 persen atau 82 LKKL pada 2018. Menurut Moermahadi, hal ini menunjukkan pemerintah telah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 95 persen pada 2019.

Selain itu, BPK juga telah memeriksa 18 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN) dari Asian Development Bank (ADB), The World Bank, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan, 17 LKPHLN memperoleh opini WTP dan 1 LKPHLN memperoleh opini WDP.

Moermahadi menyampaikan, BPK juga sudah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau sebanyak 542 LKPD pada 2018. Dari 34 pemerintah provinsi, sebanyak 32 LKPD atau 94 persen telah memperoleh opini WTP dan 2 LKPD memperoleh opini WDP.

Kemudian, dari 415 pemerintah kabupaten, sebanyak 327 LKPD atau 79 persennya telah memperoleh opini WTP, sebanyak 76 LKPD atau 18 persen memperoleh opini WDP, dan sebanyak 12 LKPD atau tiga persen memperoleh opini TMP. Selain itu, dari 93 pemerintah kota, sebanyak 84 LKPD atau 90 persen telah memperoleh opini WTP, sebanyak delapan LKPD atau 9 persen memperoleh opini WDP, dan sebanyak 1 LKPD atau 1 persen memperoleh opini TMP.

“Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah atau Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85 persen, 60 persen, dan 65 persen,” kata Moermahadi.



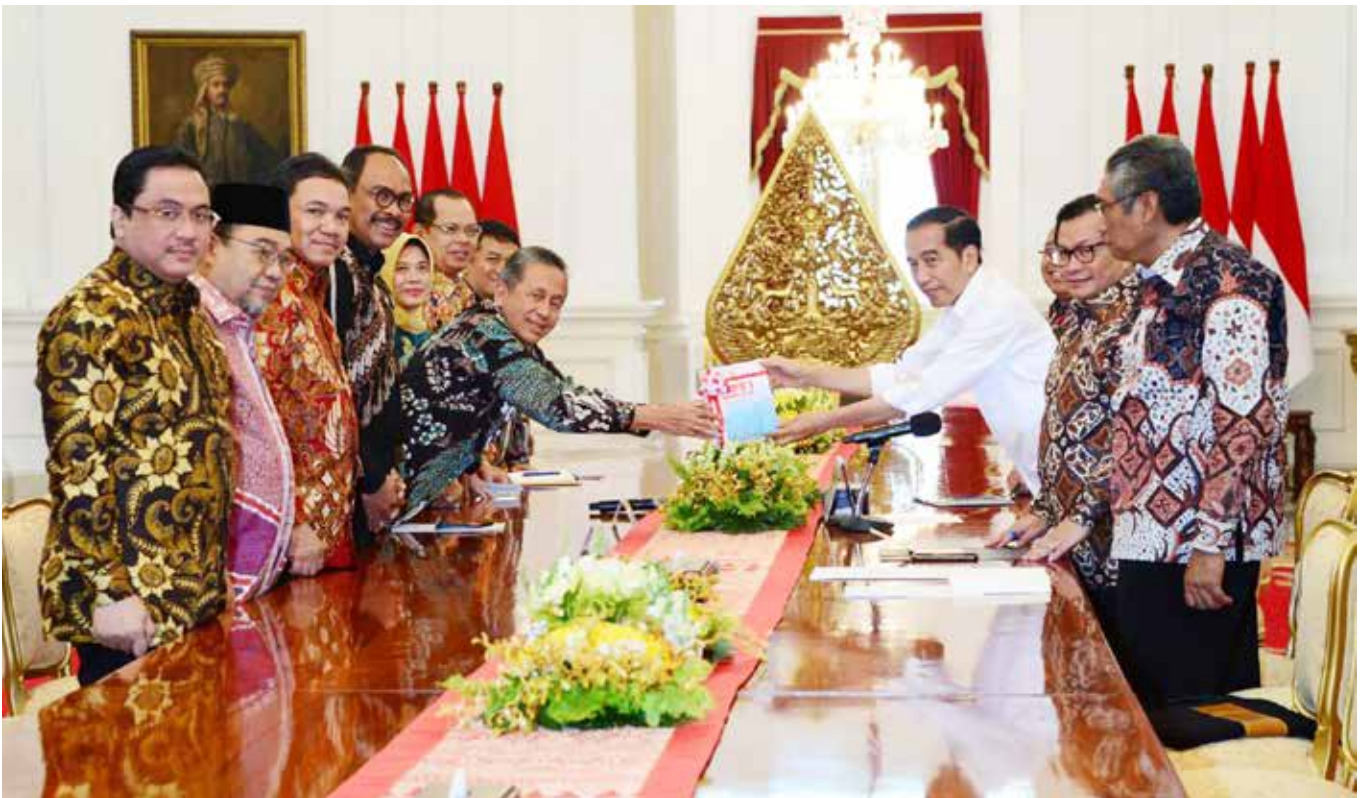
Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar.

### Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	117	1.283	3.181
▪ Pemeriksaan Keuangan	105	1.209	2.989
▪ Pemeriksaan Kinerja	3	22	48
▪ PDDT	9	52	144
Pemerintah Daerah	542	7.398	20.783
▪ Pemeriksaan Keuangan	542	7.398	20.783
BUMN dan Badan Lainnya	33	435	1.056
▪ Pemeriksaan Keuangan	4	45	87
▪ Pemeriksaan Kinerja	1	18	21
▪ PDDT	28	372	948
<b>Total</b>	<b>692</b>	<b>9.116</b>	<b>25.020</b>
Pemeriksaan Keuangan	651	8.652	23.859
Pemeriksaan Kinerja	4	40	69
Pemeriksaan DTT	37	424	1.092

Sumber: IHPS I Tahun 2019





■ Pimpinan BPK menyerahkan IHPS I Tahun 2019 ke Presiden Joko Widodo pada Kamis, 19 September 2019.



■ Pimpinan BPK saat penyerahan IHPS I Tahun 2019 ke Presiden.

Selain memeriksa laporan keuangan atas pemerintah pusat dan daerah, BPK memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya pada 2018 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji. Seluruh laporan keuangan badan lainnya pada 2018 tersebut memperoleh opini WTP.

BPK juga melakukan empat peme-

riksaan kinerja dan 37 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Pemeriksaan kinerja dilakukan atas tiga objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dan satu objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain terkait pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian mulai 2016 hingga semester I 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikdik), Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan kurang efektif.

Selain itu, BPK menyoroti kinerja atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat pada 2017 dan semester I 2018 pada PT Pertamina (Persero). "Kesimpulannya belum sepenuhnya efektif," kata Moermahadi.

Terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pemeriksaan antara lain menghasilkan kesimpulan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batu bara pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Demikian juga hasil pemeriksaan atas pengelolaan program beasiswa pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan kriteria dengan pengecualian.



Sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPR RI.

### Perkembangan Opini LKPP 2014-2018

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Opini ini setingkat dengan opini sebelumnya pada 2016 dan 2017.



Sumber: IHPS I Tahun 2019

Di hadapan rapat paripurna, Moermahadi menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2005 hingga 30 Juni 2019, BPK telah memberikan 545.995 rekomendasi sebesar Rp305,66 triliun. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp105,99 triliun.

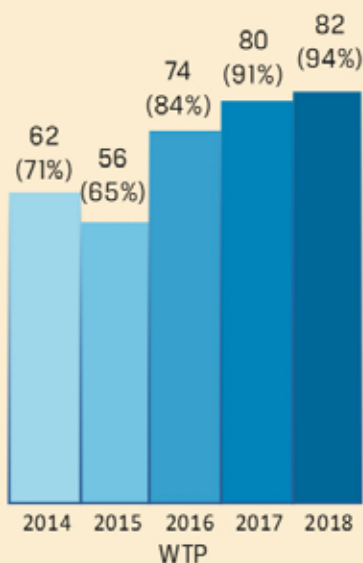
Moermahadi menambahkan, IHPS I 2019 turut memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah periode tersebut dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp3 triliun.

Moermahadi menyampaikan, IHPS

I 2019 merupakan laporan capaian kinerja terakhir dari pimpinan BPK periode 2014-2019. Moermahadi pun turut menyampaikan permohonan pamit kepada seluruh jajaran anggota DPR. Seperti diketahui, Moermahadi memasuki masa pensiun pada pertengahan Oktober.

“Sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPR RI,” ujar Moermahadi. ●

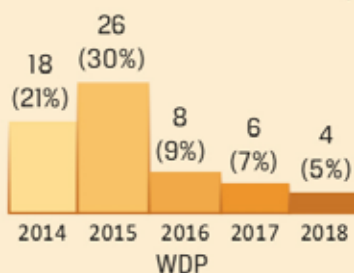
### Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN 2014-2018



Sumber: IHPS I Tahun 2019

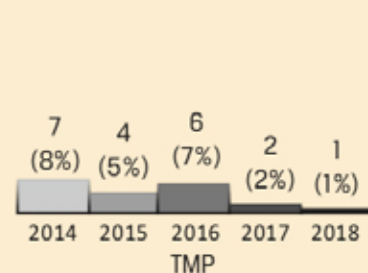
Capaian di tahun 2018

94%



Target di tahun 2019 (RPJMN)

95%





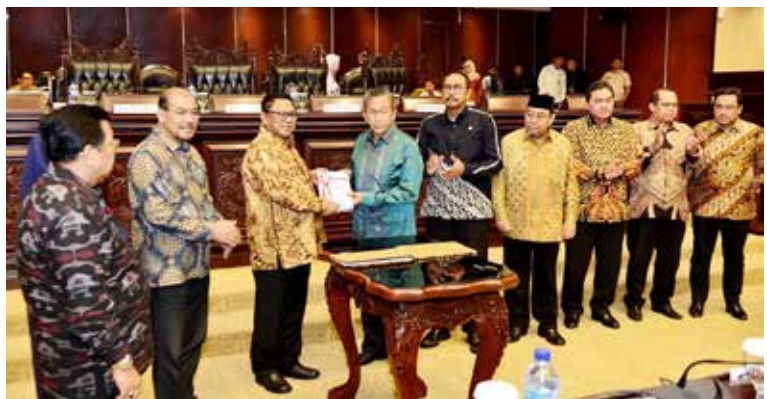
# BPK Apresiasi Peningkatan Kualitas LKPD

Kenaikan kualitas LKPD dapat tercapai karena pemda melakukan perbaikan antara lain terkait penatausahaan aset tetap, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal dengan menyetor ke kas daerah, serta penyajian pendapatan dan belanja operasi BLUD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

**K**ualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih LKPD meningkat dari 58 persen atau sebanyak 313 LKPD pada 2015 menjadi 82 persen atau sebanyak 443 LKPD pada 2018.

Capaian tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, masing-masing sebesar 85 persen, 60 persen, dan 65 persen.

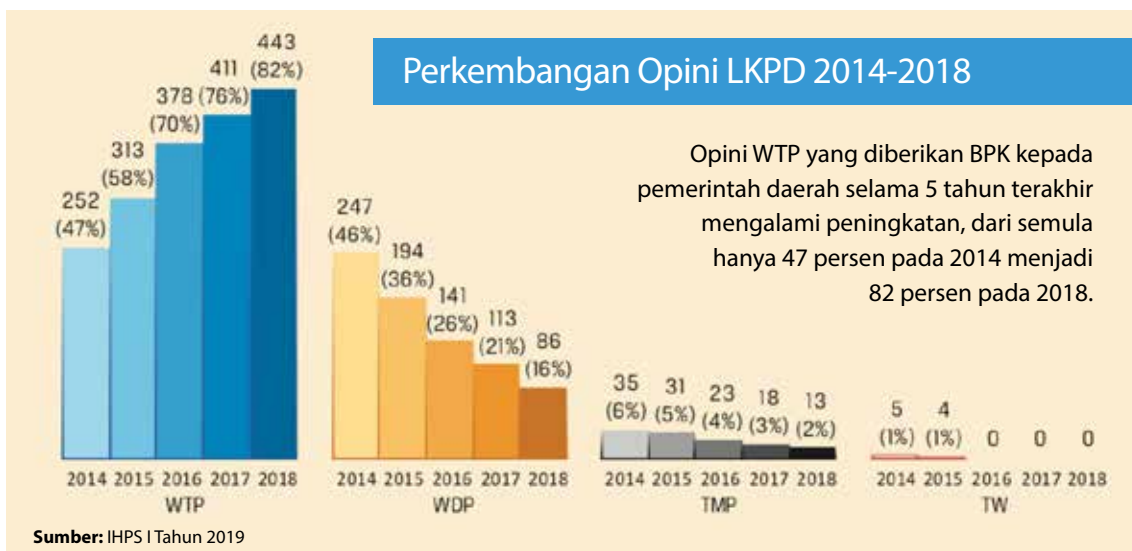
Adapun peningkatan opini WTP pada pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi meningkat dari 0% (0 LKPD) pada 2006 menjadi 94 persen (32 LKPD) pada 2018. Kemudian Pemerintah Kabupaten, opini WTP meningkat dari 0,58 persen



■ Ketua BPK menyerahkan IHPS I Tahun 2019 ke Ketua DPD pada Rabu, 18 September 2019.

(2 LKPD) pada 2006 menjadi 79 persen (327 LKPD) pada 2018. Sementara Pemerintah Kota, opini WTP meningkat dari 1 persen (1 LKPD) pada 2006 menjadi 90 persen (84 LKPD) pada 2018.

"Kenaikan kualitas LKPD tersebut antara lain karena Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya," ungkap Ketua BPK







Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9). Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua BPK menyerahkan IHPS I 2019 kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Selain Ketua BPK, hadir pula Anggota BPK lainnya yaitu Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis, serta pejabat pimpinan tinggi madya BPK. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Di hadapan Pimpinan DPD serta para Anggota DPD, Ketua BPK mengatakan BPK telah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau sebanyak 542 LKPD Tahun 2018. LKPD tersebut terdiri atas 34 Laporan Keuangan (LK) pemerintah provinsi, 415 LK pemerintah kabupaten, dan 93 LK pemerintah kota. "Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPD RI," pungkasnya.

Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan kualitas LKPD dapat tercapai karena pemda melakukan perbaikan antara lain terkait penatausahaan aset tetap, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal dengan menyetor ke kas daerah, serta penyajian pendapatan dan belanja operasi BLUD sesuai Stan-

dar Akuntansi Pemerintahan.

Meskipun perbaikan telah dilakukan, masih terdapat 99 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian LKPD secara material dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan itu terjadi pada akun aset tetap 78 pemda, aset lancar 48 pemda, dan belanja operasi 34 pemda.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2018 mengungkapkan 12.117 permasalahan yang terdiri dari 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Permasalahan SPI terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan tercatat sebanyak 4.001 permasalahan sebesar Rp2,19 triliun, serta penyimpangan administrasi sebanyak 2.258 permasalahan. Terkait permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp434,78 miliar.

Dalam kurun 2005 sampai dengan 30 Juni 2019, BPK memberikan 545.995 rekomendasi sebesar Rp305,66 triliun. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 406.495 rekomendasi (74,6 persen) atau sebesar Rp179,53 triliun sudah sesuai dijalankan di antaranya 337.518 rekomendasi sebesar Rp34,75 triliun telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

BPK mengapresiasi dukungan Pimpinan DPD dan jajarannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang intensif dari DPD dapat mendorong efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengapresiasi BPK yang telah menyelesaikan penyusunan IHPS I 2019. Darmayanti menilai, peningkatan kualitas LKPD dengan tren opini yang membaik harus ditingkatkan. "DPD RI berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan," kata Darmayanti.

Meski demikian, Darmayanti mengingatkan kepada seluruh anggota DPD untuk mencermati catatan-catatan dari BPK dalam IHPS I 2019.

"Kami meminta kepada seluruh anggota DPD untuk menjadikannya catatan penting sebagai tugas-tugas konstitusional kita," kata Darmayanti. ●

# Presiden: Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

**B**PK telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (19/9). Setelah menerima hasil pemeriksaan BPK tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

“Pagi ini sudah disampaikan dari Pimpinan BPK IHPS I 2019. Tapi, yang paling penting, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kita tindak lanjuti,” ujar Presiden.

Presiden mengaku bersyukur karena hasil pemeriksaan BPK menunjukkan tren peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Apalagi, peningkatan kualitas laporan keuangan juga diikuti oleh pemerintah daerah.

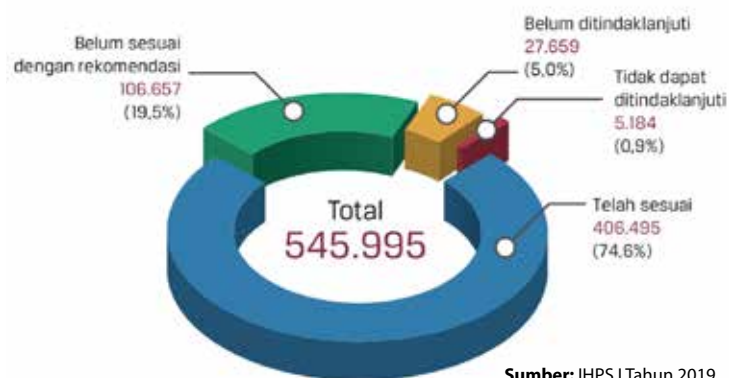
“Saya kira peningkatan-peningkatan seperti ini yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefisienan penggunaan APBN dan APBD, semua bisa kita lakukan,” ujar Jokowi.

Presiden mengakui masih terdapat empat kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 kementerian/lembaga mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*. Presiden berharap seluruh K/L dapat memperbaiki laporan keuangannya sehingga bisa mencapai opini WTP.

“Ini supaya semuanya WTP dan kepatuhan terhadap akuntabilitas, terhadap undang-undang yang ada, semua bisa menjalankannya,” kata Jokowi.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat

## Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2019



Sumber: IHPS I Tahun 2019

maupun dari pemerintah daerah mengalami progres yang membaik. Moermahadi menyampaikan, terdapat empat K/L yang mendapatkan opini WDP yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, satu K/L yang mendapatkan *disclaimer* adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Moermahadi menyampaikan, hanya tersisa dua pemerintah provinsi yang masih mendapatkan opini WDP. Sementara, laporan keuangan dari pemerintah kabupaten dan kota sudah mengalami tren yang membaik. “Persentasenya meningkat, hanya sedikit yang belum WTP,” kata Moermahadi.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, selain penyampaian IHPS I 2019, BPK menyarankan ada pemeriksaan terkait kinerja pemerintahan. Hal itu terkait dengan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Menurut Mardiasmo, usulan tersebut sangat positif guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah. “Tentu ini sangat bagus, karena diaudit pemerintah bisa jadi lebih ekonomis dan efisien dan mencapai sasaran sehingga tercapai efektivitasnya,” kata Mardiasmo.



■ Foto bersama Pimpinan BPK bersama dengan Presiden Joko Widodo selepas menyerahkan IHPS I 2019 di Istana Merdeka.

Selain itu, Mardiasmo mengatakan, Kementerian Keuangan juga akan lebih proaktif memberikan pendampingan kepada K/L yang belum memperoleh opini WTP. "Dulu misalnya TVRI dan RRI itu belum WTP sekarang sudah WTP. Jadi akan kita dampingi dan kita monitor," kata Mardiasmo.

### Tindak lanjut rekomendasi

Sejak 2005 hingga 30 Juni 2019, BPK telah menyampaikan 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp305,66 triliun. Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019, rekomendasi BPK pada periode tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penye-

toran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp105,99 triliun.

Dalam IHPS I 2019 dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut periode 2005–30 Juni 2019, permasalahan dengan status telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 406.495 (74,6 persen) sebesar Rp179,53 triliun. Sedangkan tindak lanjut berstatus belum sesuai rekomendasi sebanyak 106.657 (19,5 persen) sebesar Rp99,16 triliun. Adapun sebanyak 27.659 rekomendasi (5 persen) sebesar Rp13,03 triliun berstatus belum ditindaklanjuti dan 5.184 (0,9 persen) rekomendasi sebesar Rp13,94 triliun dengan status tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain pemantauan tindak lanjut, IHPS I 2019 memuat pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan senilai Rp3 triliun. Kerugian ini terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Pada periode itu, nilai kerugian dengan status telah ditetapkan menurut pengelola anggaran yang terbesar terjadi pada pemerintah daerah yaitu senilai Rp2,19 triliun (73 persen).

Pada periode 2005-30 Juni 2019, tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah menunjukkan terdapat angsuran Rp260,04 miliar, pelunasan Rp954,56 miliar, dan penghapusan Rp79,52 miliar. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sisa kerugian adalah sebesar Rp1,71 triliun (57 persen).

Efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Hal ini dapat semakin meningkatkan perwujudan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. ●

## Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Sumber: IHPS I Tahun 2019



# BPK Menghadiri INCOSAI XXIII di Moskow



■ Anggota II BPK saat menjadi pembicara di INCOSAI XXIII.



■ Penandatanganan MOU antara BPK dengan IDI.

Anggota II BPK menjadi anggota panelis dalam *plenary session* kongres INTOSAI.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menghadiri International Congress of the International Organizations of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) XXIII yang diselenggarakan di Moskow, Rusia, pada 23-27 September 2019. Delegasi BPK kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dengan delegasi yang terdiri atas Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota V BPK Isma Yatun, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Auditor Utama Keuangan Negara II (Tortama KN II) Laode Nusriadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Humas dan KSI) Juska Meidy Enyke Sjam dan staf Biro Humas dan KSI.

Kongres INTOSAI kali ini mengangkat dua tema diskusi utama, yaitu mengenai "*Information Technology for the Development of Public Administration*" dan "*The role of SAls in the Achievement of National Priorities and Goals*".

Anggota II BPK menjadi anggota panelis dalam *plenary session* mengenai "*Information Technology for the Development of Public Administration*" bersama Ketua Supreme Audit Institution (SAI) Amerika Serikat, Estonia, Uni Emirat Arab (UEA), Meksiko, dan Bank Dunia. Dalam sesi tersebut, Agus Joko Pramono memaparkan pengalaman BPK terkait pengembangan teknologi in-

formasi untuk pengembangan administrasi negara.

Selama mengikuti INCOSAI, BPK juga menyelenggarakan beberapa pertemuan dengan SAI lain. Sebagai Sekretariat ASEANSAI, BPK menyelenggarakan pertemuan untuk membahas proposal dari SAI Malaysia untuk mengamandemen *Agreement of ASEANSAI Establishment* pada 24 September 2019.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal BPK sebagai Head of ASEANSAI Sekretariat juga melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Auditor General of Swedish National Audit Office (SNAO) untuk membahas *progress* kerja sama bilateral pada 25 September 2019. Sebagai ketua kelompok kerja audit lingkungan badan pemeriksa keuangan sedunia (INTOSAI WGEA), BPK berkolaborasi dengan SAI Finlandia sebagai Ketua WGEA mendatang serta membuka *booth* pameran untuk mempublikasikan produk WGEA dan diseminasi rencana kerja periode tiga tahun mendatang.

Pada kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) antara BPK dengan INTOSAI Development Initiative (IDI) terkait kerja sama di bidang SAI Performance Measurement Framework (PMF), audit tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan area lainnya yang disepakati bersama.

Selain itu, BPK melakukan pertemuan bilateral dengan Auditor General of Australia Grant Hehir untuk membahas status kerja sama saat ini dan peluang area kerja sama ke depannya. ●

# BPK dan Kemenlu Gali Potensi Menjadi Pemeriksa pada Lembaga Internasional

Kemenlu pada saat ini juga sedang mendukung BPK dalam proses seleksi sebagai pemeriksa eksternal di International Maritime Organization dan United Nations Industrial Development Organization.



■ Wakil Ketua BPK dan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu.



■ Foto bersama peserta FGD.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peluang BPK menjadi Pemeriksa Eksternal dan Internal pada Lembaga-Lembaga Internasional” pada Kamis (3/10).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Kepala Badan Diklat PKN Hery Subowo, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A Ruddyard, Kepala Biro Humas dan KSI BPK, Juska Meidy Enyke Sjam, dan Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK Dwi Setiawan Susanto. Para peserta FGD merupakan pemeriksa BPK yang berperan sebagai Tim Pemeriksa International Atomic Energy Agency (IAEA) dan The Interna-

tional Anti-Corruption Academy (IACA).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kemenlu yang telah membantu dan memfasilitasi pemenangan BPK sebagai pemeriksa eksternal pada IAEA selama 2 periode sejak 2016 hingga 2019 dan pada IACA periode 2016-2017 serta 2019-2021. Kemenlu pada saat ini juga sedang mendukung BPK dalam proses seleksi sebagai pemeriksa eksternal di International Maritime Organization dan United Nations Industrial Development Organization.

“Saya berharap waktu ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga pada akhir FGD ini kita dapat merumuskan bersama usulan strategi terbaik dalam mendukung peningkatan peran BPK sebagai pemeriksa eksternal dan internal pada lembaga-lembaga internasional. Sehingga

ke depannya, BPK dapat lebih berkiprah dan menoreh prestasi di dunia internasional, baik berperan sebagai pemeriksa eksternal atau internal di lembaga-lembaga internasional”, kata Bahrullah.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi, menggali, dan membuka peluang BPK yang lebih besar sebagai pemeriksa di lembaga internasional. Selain itu, dia juga berharap BPK dan Kemenlu bisa membangun komitmen dan menyusun strategi bersama untuk pencapaiannya.

“Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa peran ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas BPK dan menunjukkan pentingnya kontribusi Kemenlu dalam prosesnya, namun juga menambah pengalaman para pemeriksa BPK di dunia internasional,” ujar Bahtiar. ●

**MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA**  
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

# Jaga Selalu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme



■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara



**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memasuki masa pensiun pada pertengahan Oktober 2019. Ada banyak pesan dan harapan yang ia sampaikan bagi seluruh insan BPK. Saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* di ruangan kerjanya, Senin, 23 September 2019, pria kelahiran Bandung, 31 Mei 1995 itu juga berbagi kisahnya selama 10 tahun mengabdikan di BPK hingga rencananya mengisi masa pensiun. Berikut petikan wawancaranya.



■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara

**Bagaimana kisah perjalanan dan pengalaman Bapak sejak pertama kali bergabung menjadi Anggota BPK hingga akhirnya menjadi Ketua BPK?**

Saya pertama kali bergabung dengan BPK menjadi Anggota I sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2014. Sebetulnya, saya dulu *gak* ada cita-cita masuk BPK. Ceritanya, waktu itu seki-

tar awal 2009 saya bersama keluarga sedang pulang ke Bogor setelah berkunjung ke rumah adik di Permata Hijau, kami melewati kantor BPK. Lalu, saya bilang sama anak saya, "De', om Sapto (Sapto Amal Damandari) kerja di sini *nih* (BPK)". Pak Sapto kan sudah jadi Anggota pada 2007.

Kemudian anak saya bilang, "Lho, om Sapto bukannya dosen juga di Bo-

gor." Saat itu posisi saya sebagai Ketua STIE Kesatuan, Pak Sapto sebagai pembantu Ketua I. Saya jawab begini ke anak saya, "Sekarang di sini jadi Anggota BPK. Terus dia bilang *kok* bisa. Saya jawab lagi dipilih *de'* di DPR. Anak saya kemudian *nyeletuk*, *kok* ayah *enggak*."

Mendengar omongan anak saya itu, saya berpikir iya juga ya kenapa saya tak jadi Anggota BPK juga.

Kemudian, saya cari informasi, tanya Pak Sapto. Kebetulan saat itu sedang mau ada pergantian Anggota. Setelah itu, saya langsung mencari informasi apa saja kerja BPK dan lain-lainnya. Lalu daftar di DPR. Bertarunglah saya untuk menjadi calon Anggota. Dulu ada banyak juga calonnya, bahkan lebih banyak jumlah pendaftar calon Anggota dibandingkan yang baru-baru ini. Alhamdulillah, saya terpilih.

Kalau dari sisi pekerjaan, karena saya punya latar belakang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), punya kantor akuntan dan lisensi akuntan publik, jadi tidak terlalu sulit beradaptasi dengan tugas-tugas di BPK.

Akhirnya, saya masuk jadi Anggota I. Periode pemilihan Anggota kedua daftar lagi. Karena saya sudah punya pengalaman dan ibaratnya sudah punya gambaran yang mendalam soal BPK, saya mendapat suara yang paling tinggi.

Singkat cerita, pada 2017 ada pergantian Ketua. Waktu itu ditanya siapa yang mau menjadi Ketua. Hanya saya dan Pak Harry Azhar yang mengiyakan. Namun, Pak Harry waktu itu mundur dari pencalonan Ketua. Akhirnya, saya dipilih secara aklamasi menjadi Ketua dan Pak Bahrullah Akbar menjadi Wakil Ketua.

Dari segi pengalaman, selama 10 tahun di BPK saya sudah mengalami menjadi Anggota I yang memeriksa di Pusat, Anggota V *megang* daerah sehingga saya sangat paham pemeriksaan di daerah. Lalu menjadi Ketua. Ibaratnya sudah komplet pengalaman saya. Kalau bicara pengalaman yang paling berkesan, bagi saya semuanya berkesan.

#### **Bagaimana Bapak melihat BPK saat ini jika dibandingkan dengan ketika pertama kali bergabung?**

BPK sudah menjadi lembaga yang dikenal luas, disegani, dan punya kedudukan serta citra yang kuat. Kesejahteraan pegawai meningkat dengan adanya Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Pejabat Tertentu (TPT). Lalu, ada perbaikan pola jabatan dengan sistem *assessment*.

BPK mulai berkembang setelah adanya UU yang baru pada 2006 (UU

Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK) dan UU Keuangan Negara. Setelah keluar UU tersebut, BPK punya Perwakilan di tiap provinsi, jumlah pegawai bertambah dan tugas serta fungsi juga berkembang.

Sekarang sudah jauh lebih baik dari sisi standar audit dan panduan-panduan pemeriksaan juga berkembang. Pada awalnya pemerintah juga masih belajar. Hal ini bisa dilihat dari capaian opini pemerintah yang awal-awalnya *disclaimer* semua. Prosesnya bertahap. Sekarang saya lihat jauh lebih baik.

#### **Bagaimana upaya BPK dalam mewujudkan visinya dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keuangan negara?**

Visi BPK adalah berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Kalau kita melihat perkembangan opini LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga), dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sejak 10 tahun terakhir, persentase yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat sangat tajam.

Pada 2004-2008, LKPP meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*. Kemudian, 2009-2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan menjadi WTP sejak 2016 hingga sekarang. Opini WTP LKKL juga terus meningkat. Dari sebanyak 42 persen pada 2009 menjadi 94 persen pada 2019. Opini WDP menurun dari 36 persen menjadi 5 persen. Sedangkan opini TMP dari 22 persen menjadi 1 persen.

Opini WTP yang diraih LKPD pun terus meningkat dari 2,73 persen pada 2009 menjadi 82 persen pada 2019. Opini WDP turun dari 74,06 persen menjadi 16 persen. Opini TW dari 7,17 persen menjadi nol persen. Sementara, opini TMP dari 16,05 persen menjadi 2 persen.

Peningkatan jumlah opini WTP pada LKKL dan LKPD ini tidak lepas dari peran BPK melalui rekomendasi dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

”

Visi BPK adalah berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Opini WTP yang diraih pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir ini karena mereka memperhatikan rekomendasi BPK. Mereka mau mendengar apa yang disarankan BPK.

Kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait hal-hal yang harus diperbaiki untuk meraih opini WTP. Saat awal-awal, yang selalu jadi masalah soal aset. Rekomendasi kita dijalankan. Sekarang, di tingkat pemerintah pusat, tinggal empat atau lima kementerian yang belum WTP.

Opini laporan keuangan di daerah juga meningkat. Namun memang lebih cepat di pusat peningkatannya ketimbang daerah. Tapi posisi terakhir sudah cukup bagus. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi hanya tinggal dua pemprov yang belum WTP.

#### **Bagaimana bentuk komunikasi BPK dengan pemerintah terkait pemeriksaan laporan keuangan?**

Kalau kita lihat dari pengakuan Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani saat beliau berpidato di acara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pemerintah memiliki *trust* kepada BPK. Selain itu, BPK sekarang sudah dianggap berbeda. Bu Sri bilang bahwa BPK sekarang memberitahu di awal jika ada hal-hal yang harus diperbaiki pemerintah. Kalau dulu, kita dianggap memberitahu di ujung saja. Ibaratnya, orang dibiarkan mengalami kesalahan kita bilang "*Nah lho, salah*".

Memang kita selalu berpesen seperti ini, "*Kalau masalah ini enggak dibenahi, enggak bisa dapat WTP. Kalau ibu enggak lakukan perbaikan, ibu pasti enggak akan WTP*". Hal demikian bukan berarti kita *enggak* independen. Kalau soal laporan keuangan, kita mesti *dong* memberitahu pemerintah kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki.

Kita informasikan ke mereka, "*Kalau masalah ini dikoreksi, opininya akan seperti ini. Kalau enggak, opininya begini*". *Kan* mereka sendiri nanti yang memilih mau seperti apa, mau mengikuti saran kita atau tidak.

BPK ini ibaratnya seperti tukang foto. Kalau hasil fotonya ingin terlihat

bagus, maka harus kita arahkan gaya orang yang difoto. Jangan dibiarkan saja.

Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, punya *trust*. Saya dengan Anggota lain berupaya membangun komunikasi untuk membangun *trust*. Dari sisi komunikasi yang dilakukan teman-teman sudah jauh lebih bagus. Masih ada yang perlu ditingkatkan, seperti soal integritas dan kompetensi.

#### **Selama 10 tahun mengabdikan di BPK, pengalaman atau prestasi BPK apa yang menurut Bapak paling membanggakan?**

Kalau bagi saya, yang pertama adalah opini LKPP yang menjadi WTP. Ini prestasi juga bagi kita. Karena, tak mungkin LKPP bisa meraih opini WTP tanpa adanya rekomendasi yang kita berikan dari hasil pemeriksaan. Ini hasil kerja keras semua teman-teman di BPK karena memberikan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pada bidang kelembagaan, kiprah dan kontribusi BPK diakui di dunia internasional. Hasil pemeriksaan kita untuk Badan Atom Dunia (International Atomic Energy Agency/IAEA) diakui semua negara. Kita juga aktif di kegiatan-kegiatan INTOSAI, ASOSAI. Mereka salut karena kita kalau *ngurusin* apa saja selalu sukses. Oleh karena itu, mereka senang kalau ada kegiatan kita yang menjadi penyelenggara.

Khusus IAEA, kita bahkan mendapat kepercayaan menjadi pemeriksa eksternal hingga 2022. Itu karena percaya sama hasil pemeriksaan kita. Banyak rekomendasi yang kita keluarkan, baik itu untuk laporan keuangan dan kinerja. Hasil pemeriksaan BPK dipresentasikan di sidang IAEA dan diapresiasi oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman.

#### **Apakah ada capaian yang diharapkan namun belum terealisasi?**

Saya rasa yang belum soal pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja harus bisa lebih ditingkatkan. Kita melakukan pemeriksaan kinerja hanya

Kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait hal-hal yang harus diperbaiki untuk meraih opini WTP. Saat awal-awal, yang selalu jadi masalah soal aset. Rekomendasi kita dijalankan. Sekarang, di tingkat pemerintah pusat, tinggal empat atau lima kementerian yang belum WTP.



tiga bulan. Seharusnya lebih lama waktunya. Lembaga pemeriksa negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat, melakukan pemeriksaan kinerja bisa sampai satu tahun. Itu supaya rekomendasi lebih komprehensif karena kita bisa melihat secara menyeluruh.

Soal pemeriksaan kinerja, ada banyak orang yang bertanya bahwa apakah hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK bisa berhubungan dengan tindak pidana korupsi? Saya bilang belum tentu. Namun, kalau kita melakukan pemeriksaan kinerja di sisi perencanaan, itu bisa untuk pencegahan korupsi. Kita memberikan *warning* lebih dahulu. Misalnya, ada perencanaan untuk membangun jalan, kita periksa proses perencanaannya.

Akan tetapi, untuk mewujudkan itu pemerintah mesti mengubah sistem anggarannya. Terkait DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), misalnya, jangan DIPA untuk tahun anggaran 2020 baru ditetapkan Oktober 2019. Dan itu pun sifatnya masih *glondongan*. Belum mendetail. Kita *enggak* bisa memeriksa Perencanaan Anggaran kalau masih *glondongan*. Katakanlah, kementerian A mau bangun kantor, nama DIPA-nya hanya ditulis 'untuk pembangunan kantor'. Tapi apa-apanya belum didetailkan. Untuk APBN 2020, semestinya di 2018 sudah diperinci. Pemeriksaan kinerja itu *kan* intinya ada tiga, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

### **Menurut Bapak, tantangan apa yang paling sulit selama menjadi Ketua BPK?**

Mengatur sembilan orang (para Anggota). Sembilan orang ini *kan* kepalanya beda-beda, pemikirannya beda-beda. Di rapat pun idenya berbeda-beda. Harus pandai-pandai kita menengahkan dan mengambil keputusan. Kalau di luar itu, saya rasa tidak ada kendala berarti.

### **Apa harapan Bapak terhadap sosok atau kriteria Ketua BPK yang akan datang?**

Dia mesti paham mengenai proses

bisnis di BPK. Mesti paham dulu. Kalau bagi saya, Ketua yang akan datang semestinya yang sudah punya pengalaman terlebih dahulu atau dijabat Anggota yang periode sekarang. Ini supaya kesinambungannya jalan.

Kalau soal kriteria, setiap orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, BPK tak perlu terlalu banyak bicara keluar atau mengomentari sesuatu yang bukan bidangnya. Kita bicara berdasarkan hasil pemeriksaan atau dari hasil kajian BPK.

### **Apa harapan Bapak untuk BPK ke depan apabila dikaitkan dengan era digital saat ini?**

Kalau pegawai-pegawai muda di BPK, saya yakin pasti bisa menyesuaikan dengan perkembangan digital. Kita juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk memudahkan tugas kita. Kita punya SIPTL, SIAP, SIPADU, SISDM, dan lain-lain. Tapi, aplikasi-aplikasi itu juga harus dijaga. Harus dipastikan untuk selalu digunakan.

Saya juga berpesan supaya para pemeriksa terus melakukan peningkatan kompetensi dan perbaikan. Contohnya dalam hal pembuatan perencanaan pemeriksaan (P2). P2 itu harus dibuat sesuai dengan kekinian. Jangan hanya menyalin dari P2 yang sudah ada.

Ada juga soal mutasi. Saya berkeinginan ada kepastian terkait pemindahan tugas. Misalnya, ditetapkan 3 tahun harus pindah tugas. Kalau sekarang *kan* tak pasti sehingga kerap menimbulkan pertanyaan, "Waduh nanti saya balik lagi apa *enggak*." Kelamaan di suatu tempat juga *kan* *enggak* bagus. Terlalu cepat juga tak bagus.

### **Kalau harapan Bapak terhadap BPK secara kelembagaan seperti apa?**

Sejak awal saya jadi Ketua, saya bertanya apa sih ukuran kesuksesan? *Enggak* ada komplain kepada BPK, tak ada masalah integritas, *gak* ada masalah di MKKE.

Terkait integritas, permasalahan itu masih ada. Pokoknya kalau udah *gak*

ada, menurut saya BPK sudah sempurna.

### **Kegiatan apa yang sudah Bapak rencanakan untuk dijalani setelah pensiun?**

Belum tahu ke mana. Kalau balik ke kampus pasti balik. Ke depan mengalir saja. Mau jadi apa *ngalir* saja. Tapi, begitu pensiun dari sini, saya akan mengaktifkan lagi kegiatan sebagai guru besar.

Saya *kan* punya *home base* di Bogor sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi di STIE Kesatuan sejak 2018. Akan saya aktifkan lagi profesi guru besar.

### **Bapak mendapat sejumlah penghargaan atau piagam tanda kehormatan, salah satunya dari Presiden Joko Widodo. Bisa diceritakan bagaimana perasaan Bapak mendapat penghargaan tersebut?**

Saya tentu berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Saya dapat tiga penghargaan, yaitu Bintang Mahaputera Nararya (diberikan oleh Presiden RI ada Oktober 2014), Bintang Bhayangkara Utama (diberikan oleh Presiden RI pada Januari 2019), dan Warga Kehormatan Kapal Selam Hiu Kencana (diberikan oleh KASAL pada Juli 2018).

### **Pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh insan BPK?**

Bekerjalah di BPK dengan sungguh-sungguh dan dengan komitmen yang tinggi. BPK merupakan institusi besar. Jagalah nama baik BPK, pegang teguh nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Jaga juga kode etik BPK.

Selain itu, kualitas pemeriksaan harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Peningkatan itu bisa didapat dengan terus mengikuti pelatihan dan pendidikan. Intinya, harus terus belajar.

Harus ada tekad dari semua untuk meningkatkan diri. Kalau opini laporan keuangan sudah bagus semua, mestinya kita sudah fokus bisa berfokus kepada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). ●



FAHRI HAMZAH, WAKIL KETUA DPR RI

# BPK Berperan Mengawal Demokrasi Melalui Pemeriksaan

**S**udah dua dekade lebih, Indonesia melewati reformasi dan menjadi negara demokrasi. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, sebuah negara demokrasi perlu terus menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Sehingga, menurutnya, BPK perlu terus diperkuat. Fahri juga memberikan sejumlah rekomendasi kerja sama yang perlu ditingkatkan antara BPK dan DPR. Berikut petikan wawancaranya:

## Bagaimana Anda melihat praktik transparansi dan akuntabilitas lembaga negara saat ini?

Saya sering memulai dengan menjelaskan perubahan filosofi negara dari negara otoriter ke negara demokrasi. Negara otoriter itu prinsip kerjanya tertutup. Karena pondasi atau filsafat dasar negara itu mengatakan, negara lebih penting daripada rakyat.

Karena negara itu penting, maka buat mereka, negara itu harus dijaga kesucian, citra, dan wibawanya. Itulah yang mendorong orang-orang yang bekerja dalam sistem otoriter itu selalu menganggap negara itu tidak boleh dibuat transparan. Apabila negara menjadi transparan maka bisa terbuka

aibnya dan tidak dihormati orang. Sehingga, dibuatlah lebih tertutup. Keputusan hanya terjadi di segelintir orang atau di belakang layar. Orang-orang tidak punya kemampuan untuk melacak apa yang terjadi di dalamnya.

Kalau demokrasi yang sudah kita lalui selama 21 tahun ini, prinsipnya berbeda. Hal yang penting dalam negara demokrasi adalah hak rakyat. Keselamatan rakyat, kebebasan rakyat, dan hak asasi rakyat. Karena itu, negara harus dibuat setransparan mungkin supaya rakyat tahu apakah kemampuan negara dalam melindungi atau menyelamatkan rakyat ini ada atau tidak. Jadi, basisnya *people's perspective* bukan *state's perspective*.

Itulah yang kemudian menyebabkan demokrasi berjalan dengan sistem terbuka. Amandemen konstitusi kita itu berjalan dengan prinsip dari tertutup kepada terbuka, dari *individual domination* menjadi *institutional transparency*. Itu menciptakan kultur baru, kultur terbuka.

Sekarang kulturnya terbuka dan ada undang-undangnya yang kita buat, yakni keterbukaan informasi publik. Itu sebenarnya untuk menerobos negara supaya negara tidak terbuat dari beton. Negara sebaiknya terbuat dari kaca. Jadi, itulah perbedaan kalau kita bicara lahirnya tradisi demokrasi. Negara itu berpindah dari bangunan beton menjadi bangunan kaca.

Jika sebelumnya, kehidupan di dalam istana tidak boleh diketahui orang begitu kita masuk menjadi negara demokrasi, semua terbuat dari kaca. Pejabat publik itu seperti bekerja di dalam akuarium.

Jadi, ada perbedaan filosofi yang harus terus menerus kita dorong. Yang hebat di negara kita itu, tradisi membangun negara terbuka sudah ada dari awal. Itulah sebabnya kenapa BPK itu lahir bersamaan dengan lahirnya konstitusi. Itu sebenarnya sebuah inovasi yang luar biasa. Kita punya kesadaran bahwa kita mau membuat negara ini terbuka dari awal. Di tempat lain, BPK itu dilahirkan oleh parlemen tidak di-



**Audit BPK sangat tajam. Saking tajamnya, semua jenis *fraud* bisa dilacak. Bahkan, kalau DPR maupun penegak hukum meminta BPK melacak lebih dalam, itu bisa disisir lagi oleh BPK. *Fraud*-nya ada di mana itu bisa dilacak.**

lahirkan oleh konstitusi. Dalam tradisi kita, BPK dilahirkan oleh konstitusi. Itu hebatnya.

#### **Seberapa besar kontribusi BPK dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi?**

Dulu, karena sistemnya otoriter, walaupun sudah ada lembaga BPK, tapi dia bekerja di bawah kontrol eksekutif yang begitu kuat. Negara kemudian berpindah dari yang terkonsentrasi kepada presiden menjadi *check and balances system*. Kita berge-rak ke sana. BPK pun sifatnya begitu. Kalau dulu BPK bekerja *under order of the president*.

Seharusnya, BPK merupakan lembaga yang independen. Satu-satunya lembaga negara yang boleh bersentuhan dengan BPK adalah parlemen dalam fungsi untuk keperluan investasi dan audit. Bukan untuk kepentingan lain. Bukan untuk menutupi borok, bukan untuk melindungi pelanggaran, bukan untuk menghaluskan temuan.

Hasil *peer audit review* kemarin oleh beberapa negara yang dipimpin Polandia itu menarik. Mereka menyatakan ada hal yang perlu ditingkatkan di BPK. Hasil *peer review* itu mengatakan, BPK tidak independen dalam keuangan. Sehingga, mereka tergantung pada Menteri Keuangan. Ini tidak baik arena rezim yang akan diperiksa menentukan rezim yang memeriksa

secara finansial. Itu tidak bagus.

Kekurangan tersebut saya kira ada juga di DPR.

Jadi, seiring dengan perubahan menjadi negara demokrasi, sudah seharusnya lembaga-lembaga independen ini juga independen dari sisi keuangan. Maka, di dalam perubahan undang-undang BPK dan DPR itu rezim keuangan independen harus ditegakkan. Supaya, jangan sampai BPK menjadi lemah ketika berhadapan dengan eksekutif untuk keperluan audit. Karena uangnya berasal dari eksekutif. Seberapa BPK mau mengaudit bisa ditahan. Ini tidak boleh terjadi dan saya kira itu temuan yang baik.

#### **Bagaimana Anda melihat kinerja BPK selama lima tahun terakhir?**

Kalau bicara profesionalisme, dahsyat ya. BPK menjadi auditor lembaga-lembaga internasional, kemudian laporan dari *peer audit* itu luar biasa, inovasi yang dilakukan, inovasi di bidang teknologi informasi, integrasi laporan, kemudian kecepatan dan kemampuan para auditor di lapangan itu saya kira dahsyat.

Saya kira begitu kita masuk ke dalam rezim internasional, secara otomatis kita terstandarisasi. Saya juga karena kebetulan pernah bekerja agak detail di beberapa pansus, selama saya di DPR, jadi saya tahu pisaunya BPK tajam sekali.



Kita ini pindah dari zaman otoriter yang pikirannya berbasis intelijen kepada zaman demokrasi yang pikirannya berbasis audit. Audit itu adalah alat negara demokrasi. Jadi, urutannya seperti ini, DPR dan pemerintah membuat undang-undang. Kemudian, presiden beserta seluruh struktur eksekutif ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang. Di ujung nanti, mereka diberikan anggaran untuk melaksanakan undang-undang. Di kotak berikutnya, BPK datang. Ada undang-undang, ada kewenangan, ada uang, kemudian BPK memeriksa. Apakah aliran kewenangan dan uang itu sesuai aturan atau tidak. Kemudian muncul temuan dan dilaporkan ke DPR.

Jadi, inilah yang harus kita *follow up*. Ada korupsi atau tidak itu kelihatan di sini. Misalnya, kalau ada kerugian negara pasti ada permainan, ada pengaturan keputusan. Audit BPK itu sangat tajam. Saking tajamnya, semua jenis *fraud* bisa dilacak. Bahkan, kalau DPR maupun penegak hukum meminta BPK melacak lebih dalam, itu bisa disisir lagi oleh BPK. *Fraud*-nya ada di mana itu bisa dilacak.

Jadi, tidak usah bicara soal operasi intelijen. Ini audit dan itu cara kerja negara demokrasi. Begitu ada temuan BPK, dilaporkan ke DPR. DPR lalu berkeputusan, ini temuan akibat *moral hazard* atau kesalahan sistem. Kesalahan pada regulasi atau institusi? Nanti kita sempurnakan. Kalau masalahnya ada di regulasi, DPR bisa memanggil presiden bahwa ada masalah sehingga perlu diperbaiki bersama agar tidak jadi temuan yang terus menerus muncul.

Kalau kesalahan sistem itu ada di level undang-undang, maka DPR dan pemerintah memperbaiki bersama. Kalau di level peraturan pemerintah (PP) maka kita bilang ke presiden. Begitu terus, sehingga sempurnalah sistem ini dari waktu ke waktu.

Kalau yang disalahkan soal moral, saya kira tidak bisa. Manusia itu mengikuti kurva normal. Yang ekstrem baik

itu sedikit yang ekstrem jahat itu sedikit. Jadi, jangan mendramatisir negara kita ini banyak yang rusak moralnya. Di mana-mana itu sama. Apa beda kita dengan orang Singapura? Kenapa orang Singapura bisa masuk lima besar indeks perspektif korupsi? Itu bukan karena moral orang Singapura lebih baik dari kita. Itu karena mereka sistemnya menjaga, sehingga orang tidak bisa berbuat kejahatan. Begitulah cara kerja sistem demokrasi. Bukan menghukum moral orang tapi memperbaiki sistem.

Di situlah peran pentingnya audit. Apalagi terkait dengan temuan berulang. Saya kira temuan berulang itu sebenarnya bukan soal *moral hazard* tapi ada persoalan sistem. Ada lubang dalam sistem.



Saya ingin di masa depan BPK ikut memeriksa lamban atau tidaknya kinerja pemerintah.

#### Bagaimana menurut Anda mengatasi lubang dalam sistem itu?

Dulu itu, seluruh anggota DPR belum merasa memiliki temuan BPK kecuali pada setiap semester ada menumpuk dokumen tebal di mejanya. Hal ini, kalau tidak ada yang membunyikan sulit bagi anggota DPR untuk membacanya sendiri. Sekarang saya minta BPK dan BAKN itu lebih memfasilitasi supaya temuan itu lebih menyebar kepada setiap otak orang misalnya melalui tenaga ahli. Saya minta ke BPK dalam periode yang akan datang, tolong melatih mereka.

Anggota DPR itu sekarang memi-

liki staf empat peneliti. Saya kira tiga orang peneliti dari masing-masing anggota bisa dilatih. Bayangkan saja, dengan 575 anggota dikalikan tiga orang itu bisa lebih dari 1.500 orang. Orang-orang ini fokus memberikan masukan kepada anggota dengan teman BPK. Sehingga, ketika rapat dengan mitra tidak berbicara soal tulisan di koran tadi pagi atau obrolan di grup Whatsapp. Jadi, dia bisa bilang berdasarkan temuan BPK nomor sekian, Anda, di departemen Anda, ada masalah. Tolong jelaskan.

Hal ini yang akan membuat mulut anggota menjadi tajam dalam memeriksa lembaga negara. Karena pisau BPK tajam dalam mengaudit. Itulah masa depan kerja sama BPK dengan BAKN beserta seluruh anggota DPR dan alat kelengkapan lainnya.

**Sejak 2016 hingga 2018, kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terus meningkat. Dengan tren yang membaik ini, apalagi yang menurut Anda perlu diperbaiki?**

Jadi, tesisnya kembali ke awal. Negara demokrasi selalu bisa memberantas korupsi karena transparansinya itu bukan hanya datang dari BPK, tapi ada pula dari media sosial dan lain-lain. Sekarang itu otomatis semuanya bisa memeriksa. Apalagi kita sebagai umat beragama, Tuhan mengawasi kita. Lebih seram lagi itu karena pengawasannya 24 jam.

Secara otomatis begitu menjadi negara terbuka, yang menonton pemerintah banyak. Sehingga, kalau ada peningkatan tren WTP memang itu sudah bagus. Hanya, sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan dari sekadar bagus. Harus ada keberanian untuk mengambil risiko utamanya dalam hal kecepatan.

Saya kira BPK perlu menambah satu variabel dalam pemeriksaannya yaitu soal kecepatan bekerja pemerintah. Eksekusi anggaran misalnya, anggaran tersisa masih banyak. Selain itu, kecepatan dalam pengambilan keputusan



■ Fahri Hamzah

juga perlu diukur.

Dalam suatu persoalan, satu keputusan itu lambat sekali dibuatnya. Padahal, kalau keputusan itu bisa dibuat dalam hitungan satu minggu misalnya, itu bisa mendorong ekonomi, menambah lapangan kerja, dan jadi macam-macam. Tapi, masih dibuat lamban oleh birokrasi.

Saya ingin di masa depan BPK ikut memeriksa lamban atau tidaknya kinerja pemerintah. Jadi, masuk dalam audit kinerja terkait kecepatan memproses suatu persoalan. Pak Jokowi kan juga sudah bilang sekarang ini tidak ada lagi negara kuat, negara besar, tapi negara cepat.

Jadi, soal kecepatan negara men-

deteksi suatu masalah itu penting. Itu menurut saya menjadi masalah saat ini dan masih sering terjadi berulang-ulang. Insting kita terhadap masalah juga tidak kuat. Misalnya, memberantas korupsi tidak selesai-selesai. Itu kan lama-lama kita terjebak juga untuk merayakannya sebagai kesuksesan, padahal itu kegagalan.

Kita bingung karena masalah ini terus terjadi berulang-ulang. Misalnya, narkoba ada penyelundupan satu ton, dua ton. Menurut saya, kalau penyelundupan itu satu gram, dua gram. Kalau sudah satu ton atau dua ton ya itu namanya ekspor impor.

Tapi, kita itu semakin banyak yang tertangkap seperti kita suka dan bertepuk tangan. Padahal, itu kegagalan karena ada persoalan sistem yang lebih besar. Kemampuan dan kecepatan kita mengidentifikasi masalah dan respons kita terhadap masalah itu penting.

#### **Apa harapan Anda kepada BPK ke depan?**

Saya ingin kembali sedikit ke hasil *peer review* itu. Mudah-mudahan BPK dan DPR bisa bersama-sama saling memperkuat karena inilah masa depan reformasi dan kedaulatan rakyat. Ini juga sekaligus mengenai profesionalisme negara dalam menangani isu kenegaraan yang rutin kita hadapi.

Saya tahu betul, kapasitas BPK itu istilahnya masih *idle*. Artinya, kemampuannya masih banyak tapi yang dipakai oleh negara ini belum banyak. Karena peran BPK yang sentral dalam audit itu belum dominan. Makanya, paling tidak hubungan BPK dengan DPR bisa direkatkan terutama lewat BAKN.

Saya juga walaupun pensiun, saya akan pantau ini supaya hasil audit itu bisa dibaca oleh semua anggota menyeluruh dan rutin. Semakin bersih lembaga negara itu maka dia semakin ringan, lemak-lemaknya hilang. Kecepatannya semakin tinggi dan di situ akan muncul daya saing. Daya saing negara ini di masa depan akan ditentukan kapasitas audit kita. ●





MUSEUM BPK KOTA MAGELANG  
Meraih Penghargaan  
**Abiwara Pariwisata Jateng 2019**  
Sebagai Peringkat I  
Daya Tarik Wisata  
(Dikelola Pemerintah)





# Menguji Nyali di Makam Tanjungpura dan Padang 12



Luas Ketapang mencapai 31.241 kilometer persegi, tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah yang luasnya mencapai 32.801 kilometer persegi.

Tak pernah terpikirkan bagi Angga Hervianto, pemeriksa muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk menjejakkan kaki di tanah Kabupaten Ketapang. Hal itu karena biasanya, pria yang sudah sembilan tahun bekerja di BPK ini mengaudit kedutaan besar Republik Indonesia dan konsulat jenderal Republik Indonesia.

Karenanya, ada beragam cerita unik ketika lulusan Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menjejakkan kaki di kabupaten yang ukurannya hampir seluas Jawa Tengah ini. Mulai dari sulitnya menuju lokasi tempat pemeriksaan hingga cerita klenik ketika terpaksa harus bekerja malam.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Angga mengatakan, menjejakkan kaki untuk bekerja di wilayah Kalimantan ini sejak 2017. Lebih tepatnya adalah saat usai Idul Fitri.

Awalnya, dia meyakini bakal merasakan gegar budaya atau *culture shock*. Akan tetapi, ternyata ia tidak merasakannya. "Saya awalnya mengira akan *culture shock*, ternyata tidak. Semua mengalir begitu saja," ucap dia di Jakarta, belum lama ini.

Sebelum turun memeriksa, dia mengaku melakukan sedikit studi terlebih dahulu. Alasannya, karena untuk pertama kalinya ia memeriksa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Kalimantan Barat. Apalagi wilayahnya sangat luas. Bayangkan, di Ketapang saja luasnya mencapai 31.241 kilometer persegi. Angka itu tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah yang luasnya mencapai 32.801 kilometer persegi.

Pernah suatu waktu, dia menuju kecamatan bernama Tumbang Titi yang memang masih masuk wilayah Kabupaten Ketapang. Jaraknya sekitar sembilan jam dari Kota Ketapang dan terpaksa harus menginap di hotel dengan kondisi seadanya.

Ketika itu, dia ingat melakukan pemeriksaan cetak sawah di kecamatan tersebut. Angga terpaksa menggunakan kendaraan bermotor untuk memeriksa apakah benar ada proses cetak sawah.

Alasannya jalan masuk ke wilayah tersebut tidak bisa dilalui mobil atau kendaraan roda empat.

Begitu sepeda motor menyala, dia pun langsung memasuki hutan tersebut. Kendaraan pun memasuki hutan lebat yang tidak ada orang sedikitpun kecuali Angga dan pria yang mengendarai motor.

"Lima menit pertama dia sedikit khawatir karena merasa, apakah benar ada cetak sawah di tengah hutan. Tetapi ternyata tidak sampai 10 menit sudah berada di lokasi," ucap dia. Tempatnya, ucap dia, sedikit menanjak ke atas bukit.

### Makam Tanjungpura

Soal wilayah ia pernah beberapa kali mendatangi lokasi-lokasi yang bersejarah. Contohnya adalah makam raja-raja Tanjungpura yang terletak di Desa Tanjungpura Kecamatan Muara Pawan. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, yaitu sekitar 1 jam perjalanan lewat darat. Tetapi jalan menuju ke sana apabila musim hujan agak becek. Apabila melalui sungai memakai *speed boat*, waktu tempuhnya kurang lebih 45 menit. Jika memakai motor air sekitar 5-6 jam perjalanan karena motor air tidak secepat *speed boat*.

Pada tempat ini terdapat makam raja-raja Tanjungpura beserta para menteri dan pembesar-pembesar kerajaan ataupun keluarga kerajaan. Jalan menuju makam sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Ketapang (Delta Pawan). Sebelum sampai ke pemakaman kita akan menemukan jalan yang terputus karena ada rawa yang tergenang air. Apabila musim penghujan atau air sungai pawan pasang, maka akan tergenang dan banjirlah jalan itu.

Sehingga, untuk melewatinya mesti memakai perahu sampan yang disediakan oleh masyarakat setempat dan memberi uang sebagai pembayaran jasa tersebut. Untuk mempermudah akses menuju makam dan daerah Tanjungpura tersebut, pemerintah telah berusaha menutup rawa tersebut



■ Angga Hervianto di perjalanan menuju Tumbang Titi



■ Penginapan Tumbang Titi

dengan menimbunnya menggunakan tanah.

Ternyata, walau sudah menghabiskan banyak kubik tanah untuk menimbunnya, rawa tersebut tidak juga dapat ditimbun, padahal luasnya tidaklah seberapa besar. Pasir yang dimasukkan bertruk-truk besar jumlahnya, tetap saja tidak bisa di timbun. Bahkan tanah tersebut hilang tanpa bekas. Selanjutnya sebagai alternatif dibangun pula jembatan. Namun lagi-lagi menjadi aneh tapi nyata, ternyata ketika tiang-tiang penyangga jembatan hendak ditancapkan, selalu saja terpendam dengan dalam, seolah-olah ada yang menariknya ke dalam tanah, lagi-lagi hilang tanpa berbekas.

"Ini adalah kisah yang sudah menjadi perbincangan masyarakat pada umumnya. Namun bisa saja struktur tanah tersebut memang labil atau ada faktor lain yang menyalahi dalam pekerjaannya. Hingga sekarang hal terse-

but masih bersifat misteri," katanya.

la saat itu menggunakan *speed-boat* dengan waktu tempuh selama 45 menit. Setibanya di Desa Tanjungpura, ia disambut oleh para anak muda yang menawarkan transportasi (ojek motor) untuk menuju ke lokasi makam Tanjungpura. "Tampaknya mereka paham betul yang menuju ke sana merupakan wisatawan yang ingin berkunjung ke makam," ujar dia.

Sepanjang perjalanan ia disuguhkan pemandangan berupa rumah-rumah kayu, rakit apung, air sungai yang mengalir tenang, dan hutan hijau di seberang sungai sebelum sampai di monumen peninggalan kerajaan: Taman Makam Raja Tanjungpura. Makam itu terletak tidak tepat di pinggir jalan, melainkan di pinggir hutan yang cukup lebat. Yang unik, sebelum masuk makam raja, ada plang yang bertuliskan "Wajib Laporkan ke Makam Perdana Menteri" yang disertai anak panah menuju satu makam lain. "Rupanya di alam lain pun masih ada protokoler... *hehe*," ucap dia.

Secara keseluruhan, Taman Makam cukup terawat dengan beberapa bangunan kecil dengan nisan yang didominasi warna kuning--warna identitas Melayu. Beberapa pilar makam dikebat (bahasa lokal yang berarti diikat) dengan kain merah polos.

Terdapat kira-kira 40 makam besar dan kecil. Tersusun rapi. Salah satu yang terbesar adalah makam Pangeran Irianata, keturunan Raja Giri Kesuma, raja muslim pertama Kerajaan Tanjung Pura. Makam itu bersanding dengan makam permaisuri, dikelilingi makam kecil-kecil yang sepertinya anggota kerajaan.

Penelitian Balai Arkeologi Jakarta mengungkap dugaan bahwa mungkin Tanjungpura adalah peradaban Islam tertua di Pulau Kalimantan. Dibawa dari tanah Melayu di pesisir timur Sumatera oleh para pedagang sekitar abad XI atau XII, kemudian sempat terpengaruh budaya Hindu dari Majapahit. Ketika era Majapahit berakhir, kerajaan-kerajaan kembali menjadi kerajaan Islam.





■ Perjalanan menuju Makam Tanjung Pura



■ Harap Lapor Ke PM 1



■ Lapor ke makam PM



■ Makam Tanjung Pura



■ Makam Tanjung Pura

Memang, dari nama dan gelar yang dipakai, seperti gusti, panembahan, pangeran, ratu, adipati, anom, nyai, dan Muhammad, tampak bahwa pengaruh Jawa (terutama Majapahit)

dan Islam sangat kental. Keunikan pemakaian gelar itu tidak menempatkan gender sebagai pembeda. Jadi saat ini dapat ditemui nama “pangeran ratu” bagi pria. Sayang sekali, seperti kebanyakan sisa kerajaan Nusantara di Kalimantan, tidak banyak peninggalan fisik dari Kerajaan Tanjung Pura selain makam dan bekas kerajaan tak terawat yang telah menjadi museum. Pelapukan dan ketidakcermatan dalam perawatan telah menghancurkannya. Kebesarnya yang pernah diakui Majapahit kini seakan surut.

Tapi, di masyarakat Melayu Ketapang, kebanggaan akan asal-usul tampaknya masih kental. Pemakaian gelar gusti dan uti, yang menunjukkan kebangsawanan masih dilestarikan. Juga masih lestariannya ikatan persaudaraan para keturunan keluarga kerajaan yang membentuk Ikramat (Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Matan dan Tanjungpura), dan mekanisme pemberian gelar kebangsawanan kepada tokoh berpengaruh di Ketapang. Agaknya nama besar Tanjungpura juga masih mengiang di masyarakat, tidak hanya menjadi nama Universitas Tanjungpura, Pangdam VII/Tanjungpura, atau nama jalan utama di ibu kota provinsi, Pontianak.

### Padang 12

Secara umum dia merasa tidak ada yang istimewa selama tinggal hampir dua tahun di Kalimantan Barat. Ini karena dia yakin bahwa setiap anggota BPK yang disebar ke seluruh Indonesia memiliki tantangan dan cerita tersendiri. “*Culture shock* nggak ada. Begitu

juga soal makanan, saya merasa tidak ada masalah. Tapi ada cerita *nih, rada mistis*,” ungkap dia.

Dia pun bercerita soal tempat yang disebut Padang 12. Menurut Angga, bagi orang yang mengaku pernah melihat, Padang 12 adalah kota yang maju dan dipenuhi kendaraan mewah. Bahkan, tutur dia, legenda dangdut Rhoma Irama pernah menggelar konser dua kali di Padang 12. Warga yang tinggal juga seperti orang pada umumnya. “Cuma yang beda mereka tidak memiliki belahan di bawah hidung dan di atas mulut,” ujar dia.

Hanya saja, kata dia, orang biasa tidak akan bisa melihat kebenaran ini. Bahkan bila kita datang ke sana, yang ada justru tanah kosong seluas hampir 12 kilometer persegi. Dia pun bersama dengan beberapa anggota BPK melewati wilayah tersebut. Sepanjang perjalanan dia hanya melihat gundukan tanah di tengah gelapnya malam.

Cerita mistis dimulai ketika ia merasa di belakang rombongannya ada kendaraan yang mengikuti. Kilatan cahaya terlihat ketika mereka mulai memasuki daerah tersebut seakan-akan mobil atau motor di belakang. “Kami sempat berdebat apakah di belakang itu motor atau mobil,” tutur dia.

Hingga kemudian kendaraan yang mereka tumpangi berhenti untuk menunggu kendaraan itu melewatinya. Setelah ditunggu begitu lama, kendaraan di belakang tersebut tidak pernah lewat. “Padahal itu jalan satu arah dan daerah sekitar tidak ada tempat tinggal,” ungkapnya. ●



# Dari Buku Harian ke Buku Komersial

Berkat hobi menulis buku harian di masa kecil, Sigit telah membuat 50 buku, sebagian di antaranya bahkan sudah dijual secara komersial.

**S**ering menulis buku harian ternyata memiliki banyak manfaat. Selain bermanfaat untuk mencurahkan isi hati, menulis buku harian mampu melatih kemampuan seseorang untuk merangkai kata-kata menjadi sebuah karya tulisan.

Hal itu seperti yang dialami Sigit Rais, Staf Subbag Publikasi dan Media, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan. Berkat hobi menulis buku harian di masa kecil, Sigit telah membuat 50 buku,



■ Sigit Rais

sebagian di antaranya bahkan sudah dijual secara komersial.

Sigit menceritakan, ia mulai menulis buku harian sejak berusia 10 ta-

hun. Ia menulis apapun yang ia alami. Selain menulis aktivitas sehari-hari di buku harian, ia juga mencoba menulis puisi.

“Waktu itu saya belajar menulis puisi dan langsung di muat di Tabloid Fantasi. Kalau tidak salah honor pertama nilainya Rp10 ribu,” tutur dia bercerita.

Tak berpuas diri, Sigit pun mulai mencoba membuat tulisan opini singkat saat masuk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Bahkan saat memasuki Sekolah Menengah Atas atau SMA, ia berani menulis naskah skenario drama.

“Lanjut kuliah di Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, masih terus menulis opini, puisi, dan cerpen tapi saya mulai berani mengirimkan ke media lokal dan nasional seperti majalah Bobo, HAI, Pikiran Rakyat, Lampung Post, Radar Bandung, dan lain-lain,” ungkapnya.

Hobi Sigit dalam menulis mulai membuahkan hasil pada tahun 2000-an. Ia berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Pertama, ucap dia, meraih juara II untuk puisi dari UNICEF dan Institut Perempuan di tahun 2004. Selang dua tahun, ia meraih Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Puisi yang digelar Lembaga Bahasa Depdiknas atau kini disebut Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Sigit di tahun yang sama mulai menjajal menjadi editor di sebuah penerbit. Profesi ini ia jalani sejak 2006 hingga 2009. Bekerja sebagai editor di penerbit di Bandung seakan menjadi kawah candradimuka bagi Sigit. Ia bisa berkenalan dengan penulis dan editor serta meminta saran tentang bagaima-



■ “99 Bisnis bagi Pensiunan”, salah satu buku Sigit yang dijual di toko buku Gramedia (2014).



■ Beberapa buku karya Sigit, yang terdiri atas novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan buku bertema bisnis.



■ *Launching* novel perdana, "Green Jomblo" di Jakarta Convention Centre (2009).

na menulis sebuah buku.

"Total sejak menjadi editor hingga saat ini saya telah membuat 50 buku. Yang masuk retail atau dijual di toko buku sebanyak tujuh buku," ungkap dia.

Selanjutnya di awal 2009, ia berhenti menjadi editor. Ia berhenti karena gempuran buku sekolah elektronik yang menyebabkan kantornya harus melakukan perampingan pegawai. Setelah itu, ia fokus menulis sejumlah buku sampai kemudian lulus seleksi menjadi staf di Badan Pemeriksa Keuangan di tahun yang sama.

## Tetap menulis

Bekerja di BPK bukan berarti Sigit meninggalkan dunia menulis. Pada September 2009, ia ditempatkan di Biro Sekretariat Pimpinan BPK. Salah satu tugasnya di Biro Setpim adalah membuat naskah pidato. Di sana dia mendapat pengalaman baru dalam perjalanan menulisnya.

Pada 2016, Sigit melanjutkan kuliah S2 jurusan Manajemen Komunikasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di sana ia belajar membuat tulisan ilmiah. "Tetapi bukan berarti saya berhenti menulis fiksi, minimal tiap tahun saya berusaha mengeluarkan buku," ucap dia.

Meski sudah bekerja, ia tetap mampu menuliskan sebuah buku. Ia menulis pada malam hari selepas pulang kerja dan terbiasa menulis dari



■ *Launching* buku "Kisah Sobat" bersama Geng Nulis Sapulidi. Beberapa penulisnya adalah pegawai BPK (2014).



■ Bedah buku Geng Nulis Sapulidi yang dilaksanakan di Kota Bandung (2014).

hari-hari sebelumnya dalam sebuah buku harian. Dalam beberapa kesempatan, ia juga diundang untuk berbagi pengalaman tentang proses kreatif menulis di sekolah-sekolah, kampus, instansi lain, bahkan di BPK.

"Buat saya sebenarnya inspirasi cerita itu bisa datang dari mana saja. Asalkan kita bisa peka terhadap sekitar," tutur dia sambil tertawa.

Kembali ke tahun 2012, Sigit sempat membuat kelompok atau geng menulis dengan teman-teman satu

kosnya yang juga pegawai BPK. Geng menulis ini bernama Geng Nulis Sapulidi.

Geng ini bahkan keanggotaannya makin meluas. Tak hanya teman kos yang berisi karyawan BPK, namun juga teman-teman lainnya. "Cerita teman-teman BPK dan teman lainnya itu kami gabungkan menjadi satu buku, jadi seperti kumpulan cerita," ujar dia.

Sigit dan rekan-rekannya pertama kali menjajal peruntungan dengan menerbitkan kumpulan cerita tersebut lewat *nulisbuku.com*. "Seluruh royalti diberikan kepada anak-anak yatim. Bagi kami menulis itu tak hanya sarana untuk menyalurkan hobi dan dapat keuntungan, tapi bisa juga jadi sarana untuk berbagi," tutur dia.

Buku berikutnya yang lahir di tahun 2014 berjudul "Kisah Sobat". Tulisan dalam buku ini berbeda dengan buku pertama yang penuh cerita saat kanak-kanak, namun lebih kepada cerita di masa remaja dan awal dewasa. "Nah, buku kedua ini kami mencoba menerbitkan sendiri," ungkapnya.

Bagi Sigit, menulis adalah proses belajar yang tak pernah berakhir. Meskipun telah melahirkan sejumlah buku, bukan berarti dia bisa berpuas diri dan berhenti belajar. Oktober tahun ini, ia menerbitkan buku kumpulan puisi berjudul "Parade Kegelapan" yang diproduksi sendiri dalam jumlah cetakan terbatas. ●



# Hidup Sehat dengan Ling Tien Kung



■ Foto bersama peserta Senam Ling Tien Kung.



■ Peserta Senam Ling Tien Kung.

Sang penemu Ling Tien Kung mengibaratkan tubuh manusia seperti aki. Apabila tidak disetrum, maka akan kehilangan kekuatannya.

**M**enyembuhkan penyakit tak melulu harus dengan mengonsumsi obat-obatan. Ada banyak terapi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah terapi Ling Tien Kung atau Ilmu Titik Nol.

Ling Tien Kung merupakan teknik gerakan penyembuhan penyakit dengan membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh. Gerakannya simpel, namun efektif dan lebih banyak melibatkan gerakan tak kasat mata.

Salah satu gerakan Ling Tien Kung yang paling banyak dikenal adalah gerakan Fu Kang atau empet-empet. Cara melakukannya dengan berdiri tegak dan pandangan mata lurus ke bawah dengan jarak pandang sekitar 2 meter.

Jari-jari kaki kemudian diacungkan (tegang) sambil melakukan gerakan

empet-tahan anus berulang-ulang seperti orang yang sedang menahan buang air besar. Gerakan ini diyakini dapat menyembuhkan penyakit yang ada hubungannya dengan darah.

Pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga instruktur Ling Tien Kung Ali Al Basyah menjelaskan, gerakan Ling Tien Kung diciptakan Fu Long Swee atau Awiek Wijaya, seorang mantan atlet lompat jauh.

Ia menceritakan, Awiek melakukan penelitian selama 20 tahun hingga kemudian memperkenalkan Ling Tien Kung kepada khalayak. Awiek bersama sang istri sebelumnya merasakan manfaat tak hanya menyehatkan, tetapi juga dapat menyembuhkan penyakit.

Ali mengatakan, sang penemu mengibaratkan tubuh manusia seperti aki. Apabila tidak disetrum, maka akan kehilangan kekuatannya. Begitu juga manusia, tutur dia, bila tidak mendapatkan dorongan, maka akan mudah sakit.

Oleh karena itu, kata dia, Ling Tien Kung disebut juga gerakan untuk mengecaskan 'aki' manusia. Manusia seperti

aki, punya kutub positif di anus dan negatif di pusar. Anus atau yang merupakan kutub positif sangat penting fungsinya dari aki manusia. Begitu juga otot-otot sekitar anus sangat penting peranannya sebagai pengikat bidang kontak dari kutub positif," ucap dia.

Berbeda dengan olahraga atau senam yang terasa melelahkan sesuai menjalankannya, Ling Tien Kung justru membuat seseorang lebih bertenaga setelah melakukannya.

"Karena tubuh seperti disetrum atau dicas, kalau yang lain dikuras tenaganya. Gerakan inti Ling Tien Kung adalah empet-empet dan jinjit-jinjit empet. Kedengarannya memang aneh, tapi manfaat gerakan empet sangat dahsyat," ungkap dia.

Ali menjelaskan, Ling Tien Kung memiliki visi "Making People Healthy", dengan semboyan Sehat Bersama Ling Tien Kung tanpa obat dan tanpa alat. Berdasarkan pengalaman masyarakat yang menjalani terapi Ling Tien Kung, ada beragam penyakit yang bisa disembuhkan, antara lain persendian, saraf kejepit, ambeien, gula, kolesterol, jantung, stroke, kanker, migrain,



epilepsi, dan masih banyak lainnya.

“Sudah banyak peserta Ling Tien Kung yang penyakitnya sembuh, mulai dari penyakit ringan sampai berat,” ujarnya.

Peserta Ling Tien Kung kebanyakan berusia di atas 50 tahun. Kendati demikian, kata Ali, Ling Tien Kung juga sangat bagus bagi masyarakat dengan usia produktif. “Bagus untuk reproduksi kita.”

Ling Tien Kung mulai dikenalkan pada 2004 di Surabaya. Awiek Wijaya berkeliling Kota Pahlawan dengan mengunjungi tempat-tempat senam untuk memperkenalkan Ling Tien Kung. Awalnya, peserta yang aktif mengikuti latihan hanya 30 orang. Setelah banyak yang merasakan manfaatnya, Awiek kemudian menggelar acara bertajuk *The Sweet Shoe of Ling Tien Kung* di Surabaya pada 2005. Acara itu ibarat jamborenya Ling Tien Kung. Ada 2.500 peserta yang mengikuti latihan bersama dalam acara tersebut.

“Secara alami anggotanya terus bertambah di tiap daerah di Indonesia. Sampai sekarang ada sekitar 6.000 anggota yang tersebar seluruh pulau di Indonesia. Pusatnya di Surabaya,” ucap dia.

Di Jabodetabek, Ling Tien Kung mulai berkembang pesat dua tahun belakangan. Saat ini terdapat 60 sasa-



● Ali Al Basyah

na yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, dan Bogor dengan jumlah anggota 6.000 orang.

Sementara di BPK, Ling Tien Kung mulai berkembang di BPK sekitar akhir 2016. Kala itu, ia mengumpulkan para pensiunan atau anggota Pepaska (Persatuan Pasca-Karya) BPK untuk latihan di ruang fitness. Pesertanya berasal dari Bekasi, Kebon Jeruk, Tangerang, Gandul dan Bintaro, dengan harapan dapat mengembangkan di sekitar rumahnya masing-masing.

“Saya mengajak pegawai BPK beserta keluarga untuk mengikuti latihan gerak Ling Tien Kung. Ling Tien Kung bukan hanya dapat meningkatkan

daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, tapi juga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit,” ucap Ali.

### Testimoni

Salah satu peserta Ling Tien Kung, Risdiyanti, merasakan manfaat yang luar biasa setelah mengikuti latihan Ling Tien Kung. Risdiyanti menceritakan, pada 2016 ia terkena penyakit asam lambung. Ia merasakan beragam keluhan mulai dari pusing terus menerus hingga jantung berdebar-debar.

Ia bahkan harus bolak-balik berobat dan ikut senam jantung selama satu tahun. Hingga kemudian ia mengikuti Ling Tien Kung sejak Agustus 2018. “Setelah enam kali latihan, saya merasa keluhan berangsur hilang. Saya benar-benar takjub keluhan saya bisa hilang, walau sesekali muncul, namun tidak berat seperti dahulu,” ucap dia.

Semenjak itu, kata dia, Risdiyanti tidak terlalu bermasalah jika telat makan. Padahal sebelumnya, telat makan sedikit saja, kepalanya terasa pusing dan seperti mau pingsan.

“Kondisi saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah, saya merasa lebih bugar dan kuat. Bagi yang belum ikut Ling Tien Kung, ayo bergabung untuk menjalani hidup sehat karena hidup sehat itu datangnya dari diri sendiri,” ujar Risdiyanti. ●



■ Peserta Senam Ling Tien Kung berlatih di halaman Masjid BPK.



■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara memberikan sambutan saat membuka International Training on Forestry Audit di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) Jakarta, 16 September 2019.

# BPK Gelar Pelatihan Audit Kehutanan Internasional ke-6

Ketua BPK mengatakan, pelatihan kali ini akan menekankan manfaat teknologi pada audit kehutanan.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus menunjukkan komitmen internasional selaku Ketua INTOSAI Working Group on Environmental Audit (WGEA) periode 2014-2019 dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satu komitmen itu diwujudkan dengan mengimplementasikan rencana kerja penyelenggaraan diklat internasional di bidang pemeriksaan kehutanan (International Training on Forestry Audit) di Indonesia. Penyelenggaraan

diklat tersebut telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak 2013 dengan menghadirkan Subject Matter Expert (SME) di bidangnya. Tahun 2019 ini merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya diselenggarakan di Badan Diklat PKN Jakarta, sekaligus yang terakhir pada periode kepemimpinan BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pelatihan kali ini akan menekankan manfaat teknologi pada audit kehutanan. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK melalui sambutannya saat membuka pelatihan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) Jakarta, Senin (16/9), yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, serta para pejabat struktural di lingkungan BPK.

Di masa sekarang, teknologi seperti teknik geospasial,





■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, dan Anggota II BPK, Agus Joko Pramono saat menanam pohon di lapangan Badan Diklat PKN, Jakarta.

dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan audit kehutanan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang diperoleh. Hal inilah yang akan dipelajari dalam pelatihan. Selain pembelajaran di kelas, peserta pelatihan juga akan diajak untuk melakukan praktek langsung di lapangan tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan bukti audit menggunakan teknologi tersebut.

Pelatihan diikuti oleh 27 peserta dari 12 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamerun, Eropa, Indonesia, Kenya, Laos, Nepal, Saudi Arabia, Sudan, Kepulauan Solomon, Thailand dan Tanzania.

Setelah pembukaan pelatihan, para peserta diajak untuk menanam pohon di lapangan Badan Diklat PKN, sebagai salah satu program untuk menghidupkan lingkungan kantor. Pada hari pertama pelatihan, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono hadir sebagai salah satu narasumber yang menyampaikan tentang Audit Kehutanan dalam Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Forestry Audit with Sustainable Development Goals Perspective*).



■ Anggota II BPK, Agus Joko Pramono turut berpartisipasi menanam pohon dalam acara International Training on Forestry Audit.



■ Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar saat menanam pohon dalam acara International Training on Forestry Audit.

Penyelenggaraan diklat diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan audit lingkungan melalui peningkatan kapasitas pemeriksa BPK RI pada khususnya dan auditor dari Supreme Audit Institution (SAI) negara-negara anggota INTOSAI WGEA pada umumnya dalam melakukan pemeriksaan kehutanan.

Dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan kinerja dalam melakukan pemeriksaan kehutanan, diklat ini diharapkan mampu membekali para pemeriksa dengan keterampilan untuk menilai aspek 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dalam program-program pemerintah terkait pengelolaan hutan. Peserta akan dibekali dengan materi terkait kriteria, metode, bukti, dan hasil pemeriksaan sehingga hubungan dan kesesuaian unsur-unsur tersebut dapat menghasilkan simpulan atau rekomendasi yang mampu meningkatkan kinerja pengelolaan hutan.

Selain itu, diklat ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu terkait lingkungan hidup terutama kehutanan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, pelaksanaan pemeriksaan yang berperspektif lingkungan tidak hanya ditujukan untuk melaksanakan kebijakan pemeriksaan tematik BPK RI namun juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh PBB pada September 2015.

Supreme Audit Institutions (SAI) diharapkan dapat memberikan ulasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pencapaian 17 *goals* yang ditetapkan dalam SDGs sehingga *outcomes* dari setiap *goals* dapat terlaksana berkelanjutan. Oleh karena itu, materi dalam diklat internasional Forestry Audit tahun 2019 memasukkan unsur-unsur terkait SDGs seperti konsep *social forestry*, inisiatif yang mengacu pada tujuan dan indikator-indikator yang digunakan dalam SDGs. ●



# Anggota III Paparkan Pentingnya Pembangunan SDM



■ Anggota III BPK, Achsanul Qosasi

BPK sebagai lembaga pemeriksa negara berkepentingan untuk mengawasi program pembangunan SDM.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menggelar program "A Day With the Board" atau sehari bersama pimpinan BPK. Kali ini, giliran Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang mengisi program tersebut. Achsanul memberikan kuliah umum kepada peserta Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama

(JFPAP) CPNS Golongan III Non Akuntansi dan Akuntansi Tahun 2019 di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 16 September 2019.

Dalam kesempatan itu, Achsanul memaparkan titik berat dan nawacita pemerintahan terpilih periode 2019-2024 yang berfokus pada perbaikan sumber daya manusia. Menurut Achsanul, fokus pembenahan SDM merupakan hal krusial dan tepat untuk memajukan bangsa Indonesia.

Ia menjelaskan, saat ini indeks sumber daya manusia Indonesia (*Human Capital Index*) sebesar 0,53. Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 ne-

gara. Ini artinya, kata Achsanul, Indonesia berada di bawah rata-rata *upper middle income countries*. Di kancah Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia berada di bawah Singapura (1), Vietnam (48), Malaysia (55), Thailand (65), dan Filipina (84).

Achsanul menambahkan, saat ini tantangan utama pemerintah maupun pihak swasta di ASEAN, khususnya Indonesia, adalah isu pertumbuhan kesempatan kerja dan kekurangan pekerja dengan keahlian tinggi untuk mengisi pekerjaan baru. Terkait hal ini, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Myanmar dan Laos.

Oleh karena itu, Achsanul menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). BPK sebagai lembaga pemeriksa negara pun berkepentingan untuk mengawasi program pembangunan SDM, termasuk di desa.

"BPK saat ini memiliki tugas mengawal dana desa yang berfokus pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tak hanya mengurus sistem keuangan, BPK ke depan sesuai RPJMN juga sepatutnya fokus pada pengawasan sumber daya manusia di desa," ujar dia.

Menurut Achsanul, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga terkait program peningkatan SDM. Achsanul mengatakan, saat ini ada ketidaksinkronan antarlembaga yang seharusnya masih berhubungan satu sama lain.

Hal itu seperti yang terjadi antara Kementeri-

an Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

"Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan seringkali ada ketidaksinkron antara Kemendikbud dan Kemenristek Dikti. Selain itu, penelitian perguruan tinggi tidak bisa diimplementasikan oleh LIPI dan tidak bisa dikaji BPPT," ucap dia.

Di depan para peserta diklat, Achsanul tak lupa meningkatkan agar mereka menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK. "Junjung tinggi dan jaga tiga nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Demi kemajuan bangsa, bantu negara kita untuk mengelola anggaran dengan benar," ucap dia mengakhiri sambutannya.

Program "A Day With the Board" juga diisi dengan kegiatan *workshop* yang terbagi dalam dua sesi. *Workshop* menghadirkan narasumber dari lintas kementerian dan lembaga, yaitu Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN-LAN Muhammad Taufiq, Kepala Pusat Pengembangan ASN BKN Ahmad Jalis, Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi Badiklat PKN BPK RI Gunarwanto, Kepala Bidang Peningkatan Kinerja PNS Kemenpan RB Agus Yudi Wicaksono, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Irham Dilmy, dan Deputi Polhukam Bappenas Slamet Soedarsono. ●



■ Anggota III BPK berfoto bersama peserta *workshop*.

# BPK Selaraskan Renstra dengan RPJMN

Keselarasan renstra BPK dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) akan mempermudah BPK dalam menentukan program pemerintah yang akan diperiksa.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2019. Rapat kerja ini mengusung tema “Dengan Rencana Strategis (Renstra), Wujudkan BPK Aktif dalam Mencapai Tujuan Negara”. Raker digelar selama dua hari pada 7–8 Oktober 2019.

Raker dibuka secara resmi oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djane-gara serta dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Anggota V BPK Isma Yatun, dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK.

Dalam arahnya, Moermahadi mengatakan, tema yang diusung dalam raker ini merupakan wujud semangat seluruh insan BPK dalam menjalankan renstra baru periode 2020–2024. Saat ini, BPK telah berhasil menyelesaikan rancangan teknokratik renstra BPK 2020–2024.

Moermahadi menyampaikan, keputusan untuk menarik maju periode renstra dimaksudkan agar peran BPK dalam mengawal pembangunan nasional dapat beriringan dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat



■ Ketua BPK membuka Rapat Kerja Pelaksana BPK tahun 2019.

lebih meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Keselarasan renstra BPK dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) akan mempermudah BPK dalam menentukan program pemerintah yang akan diperiksa.

“Renstra BPK harus disusun secara matang dan cermat karena mempunyai fungsi sangat vital dan sentral untuk menentukan keberhasilan BPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” kata Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, visi yang dirancang dalam renstra teknokratik BPK periode 2020–2024 yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, untuk mencapai tujuan bernegara”. Visi ini dimaksudkan agar BPK dapat mengoptimalkan mandatnya sebagai lembaga negara yang kredibel, bebas dan mandiri, serta mewujudkan perannya secara aktif pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dia mengingatkan, karena peran BPK semakin luas, maka BPK harus me-

ingkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. “Pimpinan BPK senantiasa mengimbau agar seluruh pelaksana BPK senantiasa menjaga dan memelihara nama baik dan marwah BPK. Ingat dan implementasikan seluruh nilai-nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Moermahadi.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, raker pelaksana BPK tahun ini memiliki peran yang sentral untuk membahas kebijakan strategi dan rencana pada kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan nonpemeriksaan. Terlebih, ujarnya, saat ini BPK tengah menyusun Renstra 2020–2024. “Pada raker 2019 ini akan dipertajam strategi dan rencana kegiatan BPK sebagai pelaksana renstra BPK,” kata Bahtiar.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Profesi Pemeriksa Keuangan Negara dengan gelar profesi Certified State Financial Auditor (CSFA) kepada Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Anggota II BPK, Anggota III BPK, dan Anggota V BPK serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. ●





# ALUR PERMINTAAN INFORMASI



### Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website



### Persyaratan

- ◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ◆ Melampirkan:
  - Identitas diri (KTP)
  - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
  - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)



Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi



### Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik



### Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

Pusat Informasi dan Komunikasi  
Badan Pemeriksa Keuangan  
(PIK BPK)  
Jl. Gatot Subroto Kav. 31  
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912  
Fax : (021) 5795 0288  
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id  
PO.BOX : 4300 JKT 10043  
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan  
Senin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat  
Senin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB  
Jumat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB

# Opini WTP versus Korupsi



OLEH **GUNARWANTO**

Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi Badan Diklat PKN BPK RI

Kasus korupsi pada entitas yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tidak sedikit masyarakat yang menduga opini WTP bisa diperjualbelikan.

**B**anyak pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi mengapa korupsi jalan terus? Pertanyaan sekaligus keluhan ini pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada satu kesempatan bertemu dengan para kepala daerah. Sri Mulyani mengatakan, mestinya jika sudah WTP, makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Faktanya, saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Memang, opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi idaman para pengelola keuangan negara. Para pejabat kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah berlomba memperoleh opini tersebut. Terlebih, pemerintah menjadikan opini WTP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola yang baik (*good gover-*

*nance*). Untuk kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah, opini WTP menjadi isu positif yang bisa dijual kepada masyarakat.

Masalahnya, opini WTP ternyata tidak menjamin bebas dari korupsi. Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Kejadian ini terjadi baik di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kasus korupsi pada entitas yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tidak sedikit masyarakat yang menduga opini WTP bisa diperjualbelikan.

Tidak keliru jika pandangan masyarakat kepada BPK menjadi jelek. Sebab, masyarakat tidak mendapat penjelasan yang benar mengenai opini BPK. Masyarakat menyangka jika WTP pasti tidak ada korupsi. Jika ada korupsi maka auditnya pasti salah. Padahal, pandangan itu dilihat dari sudut ilmu audit tidak tepat. Opini WTP bukan dimaksudkan untuk menjamin tidak ada korupsi.

”

Masyarakat menyangka jika WTP pasti tidak ada korupsi. Jika ada korupsi maka auditnya pasti salah. Padahal, pandangan itu dilihat dari sudut ilmu audit tidak tepat.



vectors

### Keterbatasan audit

Setiap tahun BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Agar laporan keuangan memiliki keandalan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka harus disusun sesuai standar akuntansi.

Opini WTP diberikan jika dalam segala hal yang material, laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedang WDP jika ada ketidaksesuaian yang material pada satu atau beberapa pos laporan keuangan namun tidak memengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. Sementara, TW jika laporan keuangan

mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar. TMP atau disclaimer jika auditor dibatasi gerakannya, tidak bisa mengumpulkan bukti audit dengan nilai sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan diragukan.

Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Pada umumnya auditor melakukan audit secara *sampling* karena tidak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi pada perusahaan besar atau entitas pemerintah yang menggunakan anggaran besar. Diperlukan biaya besar dan waktu lama untuk memeriksa seluruh populasi. Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (menjadi basi) jika waktu pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, sebagai konsekuensi me-

toda *sampling*, audit menerapkan konsep materialitas. Auditor akan membuat suatu perhitungan untuk menentukan batasan suatu transaksi dinilai material. Makin besar volume keuangan yang diperiksa maka batas materialitasnya makin besar. Jika auditor memeriksa entitas dengan jumlah aset Rp5 triliun tentu akan beda batas materialitasnya dengan yang asetnya Rp1 triliun. Misal dengan perhitungan tertentu, auditor menetapkan batas materialitasnya Rp50 juta. Maka, auditor akan fokus mengambil *sampling* transaksi dengan nilai lebih dari Rp50 juta. Di sini ada risiko auditor tidak menemukan suatu penyimpangan pada transaksi di bawah Rp50 juta karena tidak di-*sampling*. Celaknya, bisa jadi penyebab penyimpangannya adalah korupsi.

Penggunaan *sampling* merupakan praktik yang lazim dalam audit. Ini berarti audit dilakukan berdasar pengujian sebagian data secara uji petik. Cara



”

Situasi yang koruptif dan kolusif berakibat pada data (fakta) yang diterima auditor sering bersifat “rekayasa” yang disusun sangat rapi sehingga sulit dideteksi.

demikian mengandung risiko ada salah saji material yang tidak ditemukan. Namun, dengan analisa risiko dan metoda *sampling* yang tepat, maka risiko tersebut dapat dikurangi.

### Situasi sulit

Auditor yang memeriksa sektor publik, khususnya di Indonesia, menghadapi situasi yang sangat kompleks. Nilai dan jumlah transaksi di pemerintahan sangat besar, bahkan bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang besar sekalipun. Biaya untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik sangat besar. Biaya untuk membayar gaji pegawai dan berbagai kegiatan juga sangat besar. Sering ditemukan penyimpangan berupa kemahalan harga (*mark-up*), pembelian barang dan jasa tidak layak, fiktif, dan lain-lain. Hal tersebut timbul karena praktik korupsi dan kolusi di pemerintahan sangat luas (*massive*).

Situasi itu sangat menyulitkan auditor, karena auditor selalu bekerja berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Situasi yang koruptif dan kolusif berakibat pada data (fakta) yang diterima auditor sering bersifat

“rekayasa” yang disusun sangat rapi sehingga sulit dideteksi. Dengan banyaknya praktik penyimpangan, meskipun sudah menggunakan pendekatan audit berbasis risiko dan pemilihan metoda *sampling* yang tepat, auditor masih menghadapi risiko ada transaksi atau kegiatan yang luput dari pemeriksaan dan di kemudian hari ditemukan korupsi oleh penegak hukum.

Dengan keterbatasan audit dan faktor lingkungan yang koruptif, maka sangat sulit bagi BPK untuk menjamin opini WTP bebas dari korupsi. Audit memiliki keterbatasan dalam pengambilan sampel audit karena tidak semua transaksi diperiksa. Bisa terjadi, untuk sejumlah transaksi yang tidak diambil sebagai sampel, justru terjadi korupsi. Apalagi, jika sifatnya penyusutan kepada pejabat publik, sangat sulit dideteksi dari transaksi yang diaudit. Kasus suap umumnya berkaitan dengan transaksi pelayanan perizinan, pemberian konsesi, jual beli jabatan, dan jasa-jasa lainnya yang sifatnya tidak berupa penggelapan aset negara.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, masyarakat harus menyadari bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan, bukan jaminan tidak ada korupsi. Sepanjang tidak ada penyimpangan yang material dari standar akuntansi, maka opini WTP bisa diberikan.

Jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui audit investigatif. BPK sebagai lembaga audit negara, selain memeriksa laporan keuangan juga perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan investigatif. Jika hal ini dilakukan oleh BPK, maka keluhan soal opini WTP tapi korupsi kok jalan terus akan makin berkurang. Walhasil, ke depan sudah semestinya, makin banyak pemda dan instansi lain yang menerima opini WTP, maka makin berkurang pula korupsinya.

**\* Tulisan ini pernah dimuat sebagai artikel opini portal berita [www.detik.com](http://www.detik.com) (10/7/2019)**





<<<

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam Forum Pengawasan Itama, 26 September 2019.



<<<

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menandatangani Batu Prasasti Perumahan BPK RI pada acara Serah Terima Cluster BPK RI di Parung Panjang, 2 Oktober 2019.



<<<

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Kalimantan Utara, 12 September 2019.





>>>

Pimpinan BPK menerima CSR dari BNI berupa satu unit ambulans sebelum pertandingan sepak bola persahabatan BPK-BNI, 8 Oktober 2019 di Gelora Bung Karno.



>>>

Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna membuka Kegiatan *Workshop* II Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.



>>>

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengikuti senam di acara *Community Day* Badiklat PKN BPK RI, 13 September 2019.





«««

Anggota MKKE menjadi pembicara *Workshop* Implementasi Penegakan Kode Etik BPK yang dimoderatori oleh Sekjen BPK di Hotel Santika Jakarta, 10 September 2019.



«««

Anggota V BPK Isma Yatun memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi AKN V di Jakarta, 19 September 2019.



«««

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis dalam Talkshow bertopik "Perluakah Audit Dana Otsus Papua" di RRI, 19 September 2019.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



@humasbpkri.official



BPK RI Official



@bpkri



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial

### Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara